

**PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT TUNA
GRAHITA MELALUI DANA DESA DI DESA
KARANGPATIHAN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

AGUS NUGROHO

NIM: 14540044

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT TUNA
GRAHITA MELALUI DANA DESA DI DESA
KARANGPATIHAN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

AGUS NUGROHO
NIM: 14540044

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT TUNA
GRAHITA MELALUI DANA DESA DI DESA
KARANGPATIHAN PONOROGO

Oleh

AGUS NUGROHO

NIM : 14540044

Telah disetujui pada Tanggal 15 Mei 2019

Dosen Pembimbing,

Khusnudin, S.Pi., M.Ei.

NIDT. 19700617 20160801 1 052

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN**PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT TUNA GRAHITA MELALUI DANA DESA DI DESA KARANGPATIHAN PONOROGO****SKRIPSI**

OLEH :

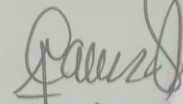
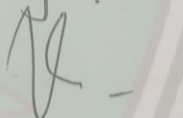
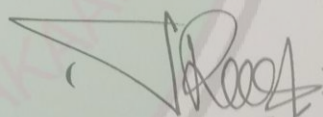
AGUS NUGROHO

NIM : 14540044

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 23 Mei 2019

Susunan Dewan Penguji :

1. Ketua Penguji
Rini Safitri, S.E., M.M
NIP. 19930328 20180201 2 193
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Khusnudin, S.Pi., M.Ei
NIDT. 19700617 20160801 1 052
3. Penguji Utama
Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M
NIP. 19770826 200801 2 011

Tanda Tangan()()()

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Nugroho

NIM : 14540044

Fakultas/jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

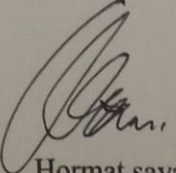
Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan Judul :

PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT TUNA GRAHITA MELALUI DANA DESA DI DESA KARANGPATIHAN PONOROGO

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Mei 2019


Hormat saya

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

KELUARGA

Karya ini saya persembahkan kepada Bapak Slamet dan Ibu Tri Marmi sebagai orang tua kandung saya yang ikhlas dan tulus membesarkan dan mendidik saya dari tidak tahu apa-apa sampai mengenal hal yang baik dalam kehidupan ini.

GURU

Tidak lupa juga karya ini saya persembahkan bagi semua guru yang sudah ikhlas mengajarkan saya dan memberi segudang ilmu bermanfaat

REKAN

karya ini saya persembahkan kepada semua rekan saya yang sudah ikut andil dalam mengsucceskan penulisan karya ilmiah ini baik secara moril ataupun materil.

MOTTO

Jika kau bertaruh dalam nama cinta, lakukan apa yang kamu suka, untuk apa takut?

Bukankah indah jika kau menang? Bahkan jika kau kalah semuanya tidak akan hilang..



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat Tuna Grahita Melalui Dana Desa di Desa Karangpatihan Ponorogo”.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

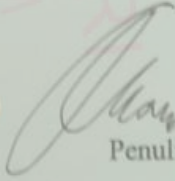
1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Khusnudin, S.Pi., M.Ei selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan telaten dalam mengarahkan, memotivasi dan menginspirasi.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Terima kasih kepada Ayah saya Slamet yang telah membesarkan saya dan mendidik saya sampai saya beranjak dewasa, semua nasihat dan pelajaran yang ayah berikan akan selalu di ingat dan dikenang.
7. Ibu saya Tri Marmi yang telah mendidik dan menasihati, dan memberikan cinta dan kasih sayang tiada tara, mempertaruhkan nyawa melahirkan anak yang sampai sekarang telah menyelesaikan tugas akhir skripsi serta dukungan moril yang tidak pernah ada batasnya.
8. Kakak ku tercinta Andri Fahrudin dan Ida Rahmawati yang selalu sabar membimbing, mengarahkan, adikmu ini yang selalu manja dengan moril dan materil yang tak terkira.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah (S1) dan para sahabatku yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Para sahabatku yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dan dengan dorongan dan semangat yang luar biasa.
11. Sahabat-sahabat terbaik seperjuangan walau tak jelas arah dan tujuan mereka namun canda tawa selalu tersirat didalamnya “KITORANG BASODARA” Faisol, Emha, Vega, Nur Salis, Salis Mufida, Baiq Nanda, Ustatun dan Anun. yang telah memberikan do’a, motivasi dan selalu memberikan semangat dalam melakukan studi hingga penulisan tugas akhir skripsi ini.

12. Paseduluran kontrakan 79 dan berganti menjadi 46 seiring perkembangan zaman yang telah memberikan do'a, motivasi dan selalu memberikan semangat dalam melakukan studi hingga penulisan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya dengan seluruh kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin

Malang, 23 Mei 2019


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teori	26
2.2.1 Keuangan Publik	26
2.2.2 Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	39
2.2.3 Kewirausahaan	50
2.2.4 Tunagrahita	54
2.3 Kerangka Berfikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
3.2 Lokasi Penelitian	57
3.3 Subjek Penelitian	58
3.4 Data dan Jenis Data.....	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data	60
3.6 Analisis Data	62
3.7 Keabsahan Data.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	66
4.1.1 Profil Desa Karangpatihan Ponorogo.....	66

4.1.2 Dana Desa di Karangpatihan.....	73
4.1.3 Permodalan.....	74
4.1.4 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Warga Tunagrahita.....	76
4.1.5 Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan	83
4.1.6 Pendampingan	85
4.1.7 Pemasaran Hasil budidaya dan Produk Kerajinan	90
4.1.8 Pendapatan Warga Tunagrahita	91
4.1.9 Klasifikasi Tema	94
4.2 Pembahasan	99
4.2.1 Dana Desa di Desa Karangpatihan.....	99
4.2.2 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Warga Tunagrahita.....	100
4.2.3 Implikasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita Melalui Pelatihan Kewirausahaan	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2.2 Kemampuan Tuna grahita berdasarkan tingkat IQ	57
Tabel 2.3 Kerangka Berfikir	58
Tabel 3.1 Deskripsi Informan	61
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2017	68
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian Desa	69
Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016	
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur.....	70
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016	
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	71
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Tahun 2016	
Tabel 4.5 Data Monografi Sumberdaya Ekonomi Desa	72
Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016	
Tabel 4.6 Pendapatan Desa Karangpatihan 2017	76
Tabel 4.7 Alokasi dana pemberdayaan Desa Karangpatihan 2017	78
Tabel 4.8 Data Masyarakat Tunagrahita Pembuat Kerajinan Tasbih	79
Tabel 4.9 Data Masyarakat Tunagrahita Pembuat Kerajinan Batik	79
Tabel 4.10 Data Masyarakat Tunagrahita Pembuat Kerajinan Keset	80
Tabel 4.11 Data warga Tuna grahita dalam kegiatan pemberdayaan	87
Tabel 4.12 Data Hasil Wawancara Pendapatan Kerajinan Tangan Keset	95
Tabel 4.13 Data Hasil Wawancara Pendapatan Budidaya Ikan Lele	96
Tabel 4.14 Klasifikasi Tema	97
Tabel 4.20 Kemampuan Tuna grahita berdasarkan tingkat IQ.....	105
Tabel 4.21 Modal Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi di	106
KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit	
Tabel 4.22 Pelatihan Kegiatan Usaha Masyarakat.....	108
Tunagrahita berdasarkan temuan hasil penelitian	
Tabel 4.23 Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat Tunagrahita	110
Tabel 4.24 Pemasaran Hasil Kegiatan Usaha	111
Tabel 4.25 Hasil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita	113
Melalui KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pendapatan Asli Desa.....	30
Gambar 2.2 Dasar Hukum Dana Desa.....	38
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Dana Desa.....	41
Gambar 4.1 Peta Desa Karangpatihan	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1 Hasil Wawancara

Lampiran-2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran-3 Peraturan Bupati Dana Desa Ponorogo

Lampiran-4 Ijin Penelitian



ABSTRAK

Agus Nugroho 2019. SKRIPSI. Judul : “Peningkatan kewirausahaan masyarakat Tunagrahita melalui Dana Desa di Desa Karangpatihan Ponorogo”

Pembimbing : Khusnudin, S.Pi, M.Ei

Kata Kunci : Dana Desa, Kewirausahaan, Tunagrahita, Karangpatihan

Karangpatihan adalah desa dengan penyandang cacat tunagrahita terbesar di Indonesia, Tunagrahita adalah kondisi kelainan psikologis yang ditandai dengan penurunan mental dan biasanya dibarengi tuli, dan juga bisu, pada kondisi yang lebih buruk pengidapnya akan mengalami kelumpuhan. Oleh karena itu, Karangpatihan bersama kepala desa Eko Mulyadi dan KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, berinovasi untuk memberikan pemberdayaan melalui berbagai pelatihan keterampilan dan kegiatan usaha yang diperkuat dengan pendanaan dari dana desa sehingga kelak dapat tercipta kemandirian ekonomi kaum tunagrahita yang diharapkan. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan kewirausahaan masyarakat tunagrahita melalui dana desa di Desa Karangpatihan Ponorogo

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan para narasumber dari perangkat desa serta masyarakat karangpatihan. Untuk analisis data menggunakan proses reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan serta pelatihan wirausaha yang dilakukan oleh kepala desa serta kelompok swadaya masyarakat rumah harapan karangpatihan bangkit yaitu, masyarakat tunagrahita diberikan pelatihan, keterampilan, dan pembinaan berwirausaha seperti membudidayakan lele, ternak kambing, dan juga berbagai jenis kerajinan tangan seperti keset, tasbih, gantungan kunci, hingga membuat batik.

ABSTRACT

Agus Nugroho 2019. THESIS. Title : “Increased Entrepreneurship of Mental Retardation People Through Village Funds in Karangpatihan Ponorogo Village”

Mentor : Khusnudin, S.Pi, M.Ei

Keywords : Village Funds, Entrepreneurship, Mental Retardation, Karangpatihan

Karangpatihan is a village with the greatest disability in Indonesia, mental retardation is a condition of a psychological disorder characterized by mental decline and is usually accompanied by deafness, and also mute, in worse conditions the person will experience paralysis. Therefore, Karangpatihan with village heads Eko Mulyadi and KSM Harapan Karangpatihan Bangkit House, innovated to provide empowerment through various skills training and business activities that were strengthened with funding from village funds so that the future economic independence of the mentally retarded was expected. So the purpose of this study was to find out how the increase entrepreneurship in the community of Mental Retardation through village fund in Karangpatihan Ponorogo Village

This type of research is a qualitative study with a case study approach. Data collection is done by interviewing the speakers from the village apparatus and the Karangpatihan community. For data analysis using the data reduction process, the presentation of conclusions data.

The results of this study show that empowerment and entrepreneurship training carried out by village heads and self-help groups in rumah harapan-Karangpatihan house, the mentally retarded people given entrepreneurship training, skills, and guidance such as cultivating catfish, goats and various types of handicrafts such as mats , prayer beads, key chains, and batik.

المخلص

أجوس نوجروهو ٢٠١٩ أطروحة. العنوان: "زيادة ريادة أصحاب التخلف العقلي من خلال أموال القرية في قرية كارانجاتهان بنوروغو"
معلمه: خوس نودين ، ق ع م. أنا
الكلمات المفتاحية: صناديق القرية ، ريادة الأعمال ، التخلف العقلي ، كارانجاتهان

كارانج باتيهان هي قرية تعاني من أكبر إعاقات في إندونيسيا ، والتخلف العقلي هو حالة من الاضطرابات النفسية التي تتميز بانحطاط عقلي وعادة ما يكون مصحوبًا بالصمم ، وكنم أيضًا ، وفي أسوأ الحالات ، سيصاب الشخص بالشلل. لذلك ، ابتكر كارانج باتيهان مع رئيسي القرية ه كو مولدي و ك ق م هارابان كارانج باتيهان ب أن ك ذلك روماه ، لتوفير التمكين من خلال التدريب على المهارات المختلفة والأنشطة التجارية التي تم تعزيزها بتمويل من صناديق القرية بحيث كان من المتوقع الاستقلال الاقتصادي المستقبلي للمتخلفين عقلياً. لذلك كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ أموال القرية لزيادة روح المبادرة في مجتمع التخلف العقلي في قرية كارانج باتيهان بولا روجو
هذا النوع من البحث هو دراسة نوعية مع نهج دراسة الحالة. يتم جمع البيانات عن طريق إجراء مقابلات مع المتحدثين من جهاز القرية ومجتمع كارانج باتيهان. لتحليل البيانات باستخدام عملية الحد من البيانات ، وعرض بيانات الاستنتاجات.
تظهر نتائج هذه الدراسة أن التدريب على التمكين وريادة الأعمال الذي قام به رؤساء القرية ومجموعات المساعدة الذاتية في منزل هارابان هارابان - كارانج باتيهان ارتفع ، أي مجتمع المتخلفين عقلياً الذين تلقوا التدريب على ريادة الأعمال والمهارات والتوجيهات مثل زراعة سمك السلور والماعز ومختلف أنواع الحرف اليدوية مثل الحصير وحيات الصلاة وسلاسل المفاتيح والباتيك.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewirausahaan merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintah Desa Karangpatihan terhadap upaya pengentasan kemandirian ekonomi masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan Ponorogo. Dalam perjalanannya, upaya kewirausahaan itu banyak menuai kontra dimasyarakat, banyak yang beranggapan bahwa memperdayakan kaum tunagrahita adalah hal yang sia-sia dan hanya membuang waktu dan tenaga, ada juga yang beranggapan bahwa membiarkan kaum tunagrahita begitu saja maka setelah mereka tua kemudian mati maka lambat laun kaum tunagrahita akan habis sendiri. Terlepas dari banyak kontra tersebut, upaya kewirausahaan tetap dilakukan oleh Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan dan Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit. Program yang banyak juga diketahui masyarakat luas dari media selama ini adalah berbagai terobosan kewirausahaan melalui pembinaan dan pelatihan kewirausahaan diantaranya beternak bebek, ayam, lele serta kerajinan tangan seperti keset perca dan batik. Setelah program itu berjalan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, akhirnya menuai hasil sesuai harapan. Masyarakat tunagrahita yang sebelumnya tidak punya pekerjaan lambat laun dapat mandiri dan mulai berpenghasilan sendiri melalui berbagai usaha bisnis tersebut. Berbagai program kewirausahaan yang didedikasikan khusus untuk masyarakat tunagrahita tersebut

dijalankan dengan biaya dari dana desa yang tiap tahunnya turun dari pemerintah pusat.

Karangpatihan sendiri merupakan salah satu Desa di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur. Desa ini juga sering disebut kampung idiot atau tuna grahita oleh masyarakat sekitar Ponorogo. Tunagrahita adalah kondisi dimana pengidapnya mengalami penurunan mental dan biasanya dibarengi tuli, dan juga bisu, pada kondisi yang lebih buruk pengidapnya bahkan akan mengalami kelumpuhan. Sebutan kampung idiot ini dikarenakan terdapat banyak penyandang cacat keterbelakangan mental tinggal di desa yang juga berpredikat sebagai daerah penyandang tunagrahita terbanyak di Indonesia. dari total sekitar 5841 jiwa atau 1848 kepala keluarga, terdapat sekitar 48 kepala keluarga atau 98 jiwa warga Desa Karangpatihan yang mengalami keterbelakangan.(detik.co.id, 2018).

Isu yang berkembang dari masyarakat sekitar mengenai penyebab banyaknya penyandang tunagrahita adalah terjadinya perkawinan sedarah antar warga dalam satu kampung tersebut. Letak desa itu memang benar-benar terisolir dari kehidupan masyarakat luas. Belum lagi minimalnya tingkat kesadaran pendidikan masyarakat sekitar yang masih rendah. Fenomena kampung idiot di Desa Karangpatihan ini menjadi viral ketika banyak media yang menyoroanya beberapa tahun terakhir.

Dengan sebutan kampung idiot yang terlanjur melekat di Desa Karangpatihan maka pemerintah desa maupun daerah berupaya maksimal untuk menghilangkan persepsi tersebut dengan cara memberikan pemberdayaan

terutama untuk meningkatkan kualitas gizi, pendidikan, dan kemandirian ekonomi kepada masyarakat tunagrahita, supaya hidup mereka bisa mandiri secara ekonomi dan tidak hanya bergantung kepada pemberian warga sekitar seperti yang sudah terjadi selama ini. Dan harapannya dikemudian hari tidak ada kelahiran anak atau masyarakat dengan menderita keterbelakangan mental.

Dana desa merupakan salah satu program terbaru dari pemerintah untuk setiap desa di Indonesia, dana tersebut diberikan setiap tahunnya oleh pemerintah untuk dikelola dan digunakan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah anggaran untuk dana desa pun cukup besar, pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta, dan untuk tahun 2018 dana desa sama seperti tahun sebelumnya yaitu Rp. 60 triliun. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. (djpk.kemenkeu.go.id, 2018).

Melihat beberapa tahun terakhir ke belakang, Indonesia juga berada pada posisi tren positif terkait pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berdasarkan hasil

kalkulasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 4,88 %, tahun 2016 sebesar 5,02 % dan triwulan I tahun 2017 sebesar 5,01 %. Berdasarkan sambutan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo pada Senin (23/1/2017) dalam kegiatan sarasehan desa di IPMI International Business Scholl Jakarta, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang rata-rata tumbuh mencapai 12 % (jpp.co.id, 2017).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Di dalam Permendes nomor 19 Tahun 2017 Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa. Pertama penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Ketiga, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa. Keempat, pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Kelima, prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Menurut peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia adalah 82.030. Dengan jumlah desa tersebut, alokasi dana desa akan memiliki beragam permasalahan pengelolaannya. Peraturan terpusat telah dibuat terkait pengelolaan dana desa, akan tetapi masih terdapat penyelewengan peraturan seperti fakta di atas.

Dari beberapa penelitian terdahulu terkait penerapan dana desa, banyak ditemukan fakta bahwa penyaluran dana desa hanya berfokus pada pengembangan fisik desa, hal ini terdapat dalam penelitian Chasanah dkk (2017), Nasution, dkk (2017), Listiyani, (2015), Milanti, (2015), serta Simangunsong, dkk (2017),

dalam berbagai penelitian tersebut terungkap penyaluran dana desa hanya sebatas pembangunan fisik desa berupa perbaikan dan pembangunan jalan, irigasi, maupun jembatan dan lain sebagainya. Berbeda halnya jika penyaluran dana desa bisa dikatakan optimal dan tepat sasaran jika pemerintah terkait mampu menyeimbangkan antara pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sependapat dengan penelitian Muhammad Eko Atmojo dkk (2017) di Desa Bangunjiwo, bahwa penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo sangat efektif terutama pada pengembangan ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan ekonomi di Desa Bangunjiwo, Adapun dari penelitian tersebut terbukti salah satu tujuan adanya program dana desa dalam mengembangkan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di desa dapat diwujudkan secara nyata.

Senada dengan kondisi masyarakat di Desa Bangunjiwo, di Desa Karangpatihan Ponorogo sejak dulu terkenal dengan kondisi perekonomian masyarakat sekitarnya yang mayoritas miskin, Di dataran yang lebih tinggi, masyarakatnya mencukupi kebutuhan keseharian dengan bercocok tanam seadanya. Karena kondisi itu, nasi menjadi barang mewah. Lebih sering mereka memanfaatkan gaplek atau singkong yang dijemur kering sebagai makanan utamanya. Hal tersebut diperparah dengan kondisi geografis desa yang gersang dan tandus serta minim sumber air disaat musim kemarau karena desa banyak dikelilingi pegunungan kapur. Keberadaan kaum tunagrahita di Desa Karangpatihan juga dianggap kutukan oleh masyarakat sekitar desa, sehingga keberadaan tunagrahita seolah menjadi kaum yang terpinggirkan. Mereka selama

ini hanya dipandang sebelah mata karena kondisinya serta ketidakproduktifannya. Mereka seakan menjadi beban yang memperberat kemiskinan yang melanda desa itu.

Keterkaitan dengan berbagai penelitian tersebut dengan adanya masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan Ponorogo, di harapkan dana desa mampu mendayagunakan dan mengembangkan kemandirian ekonomi khususnya kewirausahaan penyandang tunagrahita. Hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi peneliti selaku akademisi Perbankan Syariah yang juga berkonsentrasi dalam bidang kewirausahaan untuk menggali lebih dalam terkait program pemerintah Desa Karangpatihan dalam mengentaskan problematika kemandirian ekonomi masyarakat tunagrahita, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Peningkatan kewirausahaan masyarakat Tunagrahita melalui Dana Desa di Desa Karangpatihan Ponorogo”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

Bagaimana peningkatan kewirausahaan masyarakat Tuna Grahita melalui dana desa di Desa Karangpatihan Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Mengetahui bagaimana peningkatan kewirausahaan masyarakat Tuna Grahita melalui dana desa di Desa Karangpatihan Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait . Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1.4.1 Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan, oleh karena itu diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berfikir kritis serta tanggap dalam menghadapi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

1.4.2 Bagi masyarakat/pembaca

Sebagai sumber wawasan, bahan berfikir untuk diterapkan, dan dikaji lebih mendalam sehingga tercipta hasil yang lebih baik dan bermanfaat.

1.4.3 Bagi pemerintah

Sebagai sumber untuk mencetuskan kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan terkait optimalisasi dana desa yang terhindar dari permasalahan dan sesuai dengan fungsinya serta sebagai bahan evaluasi pengolahan dana desa yang lebih optimal.

1.4.4 Bagi desa karangpatihan

Sebagai sumber data dan acuan untuk kedepannya dapat meningkatkan kewirausahaan masyarakat tunagrahita melalui penciptaan inovasi-inoasi produk kewirausahaan yang berpotensi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Julita (2018), dengan judul “Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016”. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di Desa Sungai Ara sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah desa. Hal tersebut terlihat pada penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa yang diterapkan, seperti kurang transparansi, tidak terlaksana seluruhnya pembangunan yang direncanakan hingga ada dana yang disilpakan, dan kurang mengertinya pemerintah desa terhadap tupoksi masing-masing. Beberapa masalah yang juga muncul di lapangan seperti kondisi cuaca yang tidak memungkinkan melakukan pembangunan, serta penggunaan dana yang dilakukan oleh beberapa pihak, yang seharusnya tidak dilakukan hingga menyebabkan banyak hal yang tertunda. Dilihat dari pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, mengenai hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, hambatannya antara lain : Pertama, keterlambatan transfer dana dari kabupaten. Kedua, perangkat Desa kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai pemerintah Desa. Ketiga, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Keempat, kondisi cuaca.

Chasanah dkk (2017), dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa”. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi dana desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara belum berjalan secara optimal dikarenakan prioritas penggunaan dana desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja. Masyarakat masih memandang bahwa kebutuhan utama saat ini adalah pembangunan infrastruktur, yang tercermin pada usulan usulan ketika musrenbang tingkat dusun hingga musrenbang tingkat desa. Desa Gumelem Kulon yang wilayahnya tergolong luas dengan sebagian besar topografinya merupakan perbukitan menyebabkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan menyerap dana yang besar.

Eko (2017), dengan judul “Efektivitas Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo”. Hasil penelitian ini adalah penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo sangat efektif terutama pada pengembangan ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan ekonomi di Desa Bangunjiwo. Peran serta atau inisiatif dari pemerintah desa juga sangat penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa karena wewenang utama pemerintah desa ada pada perencanaan. Pada proses perencanaan pembangunan masyarakat Desa Bangunjiwo selalu aktif ikut berpartisipasi terutama pada kegiatan musrenbang sehingga pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan

pembangunan tingkat desa/kelurahan sebanyak 95% pada tahun 2014 dan 96,5% pada tahun 2015.

Hidayah dkk (2017), dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Hasil dari penelitian ini adalah. Pertama, perencanaan program penggunaan dana desa di Desa Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif, hal ini dengan diadakannya musrenbangdes yang dihadiri oleh unsur masyarakat untuk mendapatkan mufakat bersama. Kedua, pelaksanaan Pengelolaan dana desa didesa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi karena pemerintah desa belum terbuka terhdap masyarakat yang membutuhkan data mengenai keuangan dana desa. Ketiga, pertanggungjawaban dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal petanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan kedisiplinan oleh pengelolaa keuangan desa.

Nasution (2017), dengan judul “The Role of Village Funds to the Development Area in the Sub-District of West Bilah, Labuhanbatu Regency, North Sumatera, Indonesia”. hasil dari penelitian ini adalah. Pertama, ada peran program dana desa ke pengembangan daerah: Bandar Bandar Kumbul, Desa janji, dan Desa Tanjung Medan di kecamatan kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu. dana desa diprioritaskan untuk desa pembangunan dalam bentuk infrastruktur pembangunan seperti jalan, selokan dan suspense jembatan. Kedua, ada perbedaan yang signifikan dalam pendapatan rata-rata komunitas sebelum dan sesudah pelaksanaan dana desa pada Tahun Fiskal 2015 di kecamatan Bilah Barat

kabupaten Labuhanbatu di Desa Bandar Kumbul, desa Janji, dan Desa Tanjung Medan. Rata-rata sebelumnya Penghasilannya Rp. 2.433.777.78 rupiah dan Rp. 2.997.777,78 setelah itu di desa Bandar Kumbul, desa Janji, dan desa Tanjung Medan, kabupaten Bilah Barat, Distrik Labuhanbatu.

Simangunsong (2017), dengan judul “Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District)”. Hasil penelitian ini adalah. Pertama, partisipasi masyarakat masih belum efektif dalam mendukung pembangunan di Desa Pasir Putih. Kedua, efisiensi kinerja yang buruk dari personil desa Pasir Putih seperti yang terlihat dalam perencanaan, implementasi, dan pelaporan akuntabilitas yang ketinggalan jadwal. Ketiga, pengaruh pembangunan tahun 2015 dari pengelolaan dana desa adalah pengembangan 5 sumur bor dari sistem air murni untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Keempat, kebutuhan desa telah dipenuhi pada tahun 2015, yaitu pengadaan kendaraan roda dua, pengadaan beberapa peralatan kantor, dan pembangunan 5 sumur bor di desa Pasir Putih, namun masih banyak desa kebutuhan yang belum dipenuhi. Kelima, semua kebutuhan publik dalam pengelolaan dana desa 2015 belum dipenuhi karena keterbatasan anggaran dan partisipasi masyarakat yang rendah aspirasi yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kurang efektif. Keenam, pemerintah telah mendistribusikan ke rekening desa secara adil dan secara merata berdasarkan perhitungan sesuai peraturan Bupati No. 4 tahun 2015, dan dibagikan dalam 3 tahap sesuai dengan peraturan pemerintah no. 60 dari 2014, ii) Kesejahteraan sosial di Desa Pasir Putih melalui pengelolaan dana desa belum dipenuhi karena kurangnya kerjasama

antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan, dan juga karena keterbatasan anggaran. Ketujuh, pengaruh pemecahan masalah dalam pemerintahan desa dan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial melalui kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan publik. Kedelapan, kebutuhan yang diprioritaskan yang telah dipenuhi pada tahun 2015 sedang dibangun dari 5 sumbu dari sistem air murni, dan yang belum terpenuhi sedang dibangun rumah layak huni, perluasan area balai desa, pengembangan pendidikan dan kesehatan. Kesembilan, tercapainya efek pengelolaan dana desa di Desa Pasir Putih tidak optimal, karena personil desa gagal bertemu jadwal setiap proses pengelolaan dana desa. Kesepuluh, pengaruhnya pada tahun 2015 adalah dana dari pemerintah pusat ditransfer langsung ke Pemerintah Kepulauan Yapen dan kemudian didistribusikan dalam 3 tahap ke rekening Pasir- Desa Putih digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, namun pada tahun 2015 belum optimal. Kesebelas, faktor pendukung dan penghambat evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Pasir Putih adalah sebagai berikut: Faktor pendukung eksternal adalah sebagai berikut: i) Kekuatan budaya masyarakat adalah faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Pasir Putih dan juga karakteristik unik dari desa, ii) Kekuatan hukum juga merupakan pendukung faktor dalam pengelolaan dana desa sejak peraturan hukum terkait desa manajemen dana dapat mengatur dan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran di desa manajemen dana, iii) Pemerintah memiliki peran penting

dalam mendukung manajemen dana desa karena tugasnya adalah mengendalikan pengelolaan dana desa di setiap desa.

Siswanto dkk (2017), dengan judul “Community Participation and Stakeholders in Village Fund Management”. Hasil dari penelitian ini adalah Mandat UU Desa memberi otoritas masyarakat desa dalam mengambil keputusan melalui Musdes dan Musrenbangdes. Jadi prioritas proposal berasal dari komunitas desa, didiskusikan dan diputuskan oleh penduduk desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki oleh desa itu sendiri dan sumber keuangan desa setiap tahun. Keputusan itu tidak dibuat oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa, karena pemerintah desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari Musdes dan hasil Musrenbangdes dituangkan dalam dokumen pembangunan desa pelaksanaan. Konsultatif Desa Dewan (BPD) memiliki peran penting sebagai jembatan aspirasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa program oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Pamong). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah desa juga harus mencapai sisi pemberdayaan masyarakat. Implementasi komunitas pemberdayaan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat untuk membangun diri bersama. Menyediakan ruang untuk partisipasi bagi masyarakat, terutama kaum miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka wewenang dan kendali atas keputusan tentang sumber daya pembangunan.

Baskara (2016), dengan judul “Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Dan Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Tahun 2015-2016)”. Hasil penelitian ini adalah

Secara umum implementasi dana desa di Desa Bangunharjo pada tahun 2014-2016 dari pusat turun semua, akan tetapi masih belum adanya keterbukaan mengenai CV pengalokasian semua dana desa tersebut. Kemudian sumber daya manusia yang kurang bisa menjalankan atau mengoperasikan komputer. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya pelaporan dana desa di Desa Bangunharjo ini. Sedangkan implementasi dana desa di Desa Sumberagung pada tahun 2014-2016 tidak adanya kendala yang berarti. Alokasi dana desa dilaksanakan secara terbuka serta menggunakan acuan pembangunan yang sudah tertata dengan baik. Hal itu dikarenakan Desa Sumberagung sudah memiliki RPJMDES dan RKPDES sebagai acuan pembangunan desa.

Sofiyanto (2016), dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. Hasil penelitian ini adalah. Pertama, pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP. Dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, dana desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa

Banyuates baik dibidang pembangunan fisik maupun pemberberdayaan masyarakat.

Dzauqy (2015), dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng”. Hasil dari penelitian ini adalah. Pertama, pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomo 93 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa di Kecamatan Ganra berjalan cukup lancar, akan tetapi ada beberapa hambatan yang terjadi pada penyaluran dana desa yang mengalami keterlambatan, dimana penyaluran dana desa di Kecamatan Ganra tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan pemerintah. Kedua, beberapa hambatan dalam pelaksanaan dana desa yang ditemui yakni penyaluran dana desa yang agak terlambat diterbikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang dimana Juknis merupakan hal pokok yang penting dalam pelaksanaan dana desa, yaitu sebagai patokan atau pedoman aparat dana desa dalam melaksanakan dana desa. Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan salah satu hambatan dalam pelasaan dana desa di Kecamatan Ganra, yaitu ditandai dengan masih kurangnya kemampuan aparat desa dalam penggunaan teknologi dan juga masih belum sigap dalam pencairan dana desa.

Listiyani (2015), dengan judul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang”. Hasil penelitian ini adalah. Pertama, ketepatan Kebijakan Kebijakan penggunaan anggaran yang ada sudah ditargetkan untuk

pembangunan fisik. Begitu juga kebijakan Penggunaan dana desa tahun anggaran 2015. Hasilnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang dapat meningkatkan pembangunan desa khususnya pada prasarana fisik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Kesesuaian ini juga karena perumusan kebijakan Penggunaan dana desa telah dirumuskan oleh aktor-aktor yang sesuai dengan misi kelembagaannya. Ketiga, ketepatan pelaksana dalam pelaksanaannya kebijakan penggunaan dana desa tahun 2015 diselenggarakan pemerintah Bersama masyarakat. Selain itu juga terdapat kerjasama antar aktor sehingga implementasi dapat terwujud dengan baik. Ketiga, etepatan seluruh target telah diintervensi sesuai rencana. Meski terdapat penggunaan anggaran lain, namun tidak bertentangan dan tidak mempengaruhi implementasi kebijakan. Kesesuaian ini juga karena seluruh target berada dalam kondisi siap, karena dukungan juga dari masyarakat. Dan hampir seluruh kegiatan pembangunan dalam kebijakan penggunaan dana desa tahun 2015 merupakan kebijakan yang bersifat baru. Sehingga realisasi implementasi kebijakan dapat berjalan baik. Keempat, ketepatan Lingkungan Interaksi diantara para Lembaga perumus kebijakan telah berjalan dengan baik. Selain itu opini masyarakat menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penggunaan dana desa tahun 2015 dan implementasinya. Adanya lembaga strategis di masyarakat yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan juga mendukung implementasi dapat berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam bergotong royong, dan tersedianya peralatan dan perlengkapan pembangunan, menjad faktor pendukung efektivitas

implementasi kebijakan Penggunaan dana desa tahun 2015. Namun waktu pelaksanaan yang tertunda dikarenakan faktor cuaca dan suatu acara di desa serta masih terbatasnya anggaran dana desa yang diterima, menyebabkan kurangnya material menjadi faktor penghambat efektivitas implementasi kebijakan dana desa tahun anggaran 2015 di Desa Gunungpring.

Milanti (2015), dengan judul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2015)”. Hasil penelitian ini adalah. Pertama, pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015 dilakukan secara terpadu dengan gotong-royong. Pembangunan infrastruktur secara terpadu dengan gotong-royong dilakukan secara bersamaan karena masyarakat Desa Gilangharjo menerapkan nilai-nilai masyarakat pedesaan. Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015 menggunakan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dengan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat maka pembangunan yang dilaksanakan dapat benar-benar sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masyarakat. Ketiga, dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur terserap secara optimal. Dana desa digunakan untuk pemerataan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN. Dana desa Gilangharjo yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2015 yang berjumlah Rp.1.685.203.000,- dan sebesar 70% (Rp.1.179.642.000,-) digunakan untuk pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur dapat terserap sebesar

Rp. 1.141.367.500,21. Keempat, pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pembangunan Desa Gilangharjo berdasarkan keadaan dan kondisi wilayah masyarakat setempat. Sehingga dengan memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat dapat dilihat kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Koordinasi antar Pemerintah Desa, Kepala Dukuh dan Ketua RT menjadi kunci dalam sebuah perumusan kebutuhan dan prioritas pembangunan ditingkat RT atau Pedukuhan. Kelima partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo adalah masyarakat Gilangharjo sendiri dengan partisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur secara gotong royong, namun pada wilayah yang masyarakatnya memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas menggunakan jasa buruh bangunan agar pembangunan infrastruktur dapat tetap berlangsung. Keenam, hasil dari pembangunan Desa Gilangharjo sesuai dengan keinginan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 sesuai dengan keinginan masyarakat karena masyarakat sebagai perencana dan pelaksana proses pembangunan infrastruktur. Ketujuh, kendala dalam pembangunan infrastruktur. Kendala pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas yang enggan melakukan pembangunan infrastruktur.

Ar Royyan, dkk (2018), dengan judul ‘The Implementation of Village Fund Policy in Improving Economy of Village Society (Case Study at Kuala Sub-District of Nagan Raya District)’. Hasil penelitian ini adalah Dari hasil penelitian

di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi alokasi dana di Kecamatan Kuala Nagan Raya adalah masih belum maksimal dalam pemanfaatan potensi desa, karena programnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan upaya ekonomi perbaikan belum maksimal. Penggunaan desa dana tidak hanya berlaku untuk pihak lain tetapi juga untuk hal-hal lain seperti meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok pemberdayaan dan badan usaha milik desa, dan juga pengembangan masyarakat pengembangan pendidikan anak usia dini, kelompok desa dan olahraga fasilitas untuk kaum muda. Potensi desa berperan penting peran dalam mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu alokasi dana desa harus diarahkan untuk mendorong masyarakat pengembangan, keterampilan pelatihan, pemberdayaan perusahaan milik desa (BUMG) melalui potensi desa, dengan harapan masyarakat akan menerima pendidikan ekonomi sehingga terwujudnya ekonomi program peningkatan dapat diimplementasikan secara optimal.

Seprida Kurniawati, dkk (2016), dengan judul “The Influence of Village Fund Towards Achievement of Society’s Welfare at Wukirsari Village Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, program implementasi dana desa di desa ini dijalankan melalui manajemen sistematis berdasarkan teori manajemen yang baik termasuk perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian. Kedua, langkah perencanaan dilakukan melalui mengatur program tahunan pembangunan dan pembentukan desa prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, itu pengelolaan dana desa berada di bawah tanggung jawab kepala desa dan untuk penyelenggara implementasinya dipimpin

oleh Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat didampingi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan panitia PT pembangunan dari masyarakat. Keempat, dana ini digunakan untuk mengaktualisasikan public fasilitas fisik berdasarkan prioritasnya yang dijelaskan pada pemerintah peraturan. Fasilitasnya terdiri dari fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, pendidikan fasilitas, fasilitas ekonomi dan bisnis, dan sebagainya. Kelima, untuk mencapai tujuan pembangunan, pengelolaan dana desa juga dikendalikan dan diawasi oleh pihak pemerintah agar tetap memantau implementasinya di Desa.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun dan judul penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Elma Julita, (2018), Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengelolaan dana desa di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016? 2. Apa Hambatan dalam Pengelolaan dana desa di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016? 	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana desa di Desa Sungai Ara sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun kurang transparansi, 2. Hambatannya, Pertama, keterlambatan transfer dana dari kabupaten. Kedua, perangkat Desa kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai pemerintah Desa. Ketiga, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Keempat, kondisi cuaca
2.	Khuswatun	Bertujuan untuk mendeskripsikan	Kualitatif dengan	Implementasi dana desa di Desa Gumelem Kulon

	Chasanah, dkk, (2017), Implementasi Kebijakan Dana Desa	dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara.	pendekatan deskriptif	Kabupaten Banjarnegara belum berjalan secara optimal dikarenakan prioritas penggunaan dana desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja.
3.	Muhammad Eko Atmojo dkk, (2017), Efektivitas Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo	Mengetahui dan menganalisis efektivitas dari alokasi dana desa menuju pembangunan masyarakat khususnya pada aspek ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Bangunjiwo.	Kualitatif	Penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo sangat efektif terutama pada pengembangan ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan ekonomi di Desa Bangunjiwo.
4.	Nurul Hidayah, dkk, (2017), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	1. Bagaimana Akuntabilitas Perencanaan dana desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana Akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	1. Perencanaan program penggunaan dana desa di Desa Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif. 2. Pengelolaan dana desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi.
5.	Faizal Amanda Nasution, dkk,	1. Mengetahui	Kualitatif	1. Peran program dana

	(2017), The Role of Village Funds to the Development Area in the Sub-District of West Bilah, Labuhanbatu Regency, North Sumatera, Indonesia	<p>peran dana desa untuk pengembangan daerah di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.</p> <p>2. Mengetahui perbedaan antara pendapatan rata-rata komunitas sebelum dan sesudah implementasi dana desa di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.</p>	dengan pendekatan kualitatif	<p>desa diprioritaskan untuk desa pembangunan dalam bentuk infrastruktur pembangunan seperti jalan, selokan dan suspense jembatan.</p> <p>2. Perbedaan yang signifikan adalah rata-rata sebelumnya Penghasilannya Rp. 2.433.777,78 rupiah dan menjadi Rp. 2.997.777,78</p>
6.	Fernandes Simangunsong, dkk, (2017), Evaluation of Village Fund Managementin Yapen Islands Regency Papua Province(Case Study at PasirPutih Village, South Yapen District)	<p>1. Mengetahui bagaimana evaluasi pengelolaan dana desa di Kabupaten YapenIslads, Provinsi Papua (studi kasus di Desa PasirPutih, Kabupaten Yapen Selatan)?</p> <p>2. Mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi Desa Pengelolaan dana di</p>	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	<p>1. Partisipasi masyarakat masih belum efektif dalam mendukung pembangunan di desa Pasir Putih.</p> <p>2. Efisiensi kinerja yang buruk dari personil desa PasirPutih seperti yang terlihat dalam perencanaan, implementasi, dan pelaporan akuntabilitas yang ketinggalan jadwal.</p> <p>3. Pengaruh pembangunan tahun 2015 dari pengelolaan dana desa adalah pengembangan 5 sumur bor dari sistem air murni untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.</p>

		<p>Kabupaten YapenIslads, Provinsi Papua (studi kasus di Jakarta Desa PasirPutih, Distrik Yapen Selatan)?</p> <p>3. Mengetahui Upaya apa yang harus dilaksanakan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam evaluasi pengelolaan dana desa di Kabupaten YapenIslads, Papua Provinsi (studi kasus di Desa PasirPutih, Kabupaten Yapen Selatan)?</p>		
7.	Budi Siswanto, dkk, (2017), Community Participation and Stakeholders in Village Fund Management	Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa.	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Adalah Mandat UU Desa untuk memberi otoritas masyarakat desa dalam mengambil keputusan melalui Musdes dan Musrenbangdes. Jadi prioritas proposal berasal dari komunitas desa, didiskusikan dan diputuskan oleh penduduk desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki oleh desa itu sendiri dan sumber keuangan desa

				setiap tahun.
8.	Fajar Baskara, (2016), Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Dan Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Tahun 2015-2016)	Mengetahui bagaimana implementasi dana desa di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon dan Desa Sumberagung kabupaten Bantul	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Secara umum implementasi dana desa di Desa Bangunharjo pada tahun 2014-2016 dari pusat turun semua, akan tetapi masih belum adanya keterbukaan mengenai CV pengalokasian semua dana desa tersebut.
9.	Moh. Sofiyantodkk, (2016), Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang	Mengetahui pengelolaan dana desa di desa Banyuates kecamatan Banyuates kabupaten Semarang	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pertama, pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Kedua, dana desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik dibidang pembangunan fisik maupun pemberberdayaan masyarakat.
10.	Ahmad Dzauqy	1. Mengetahui	Kualitatif	1. Pelaksanaan Peraturan

	Abdur Rabb, (2015), Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng	implementasi dana desa apakah telah sesuai PMK No. 93/PMK. 07/2015 di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, 2. Untuk mengetahui faktor penghambat lemahnya pelaksanaan dana desa di kecamatan ganra, kabupaten soppeng.	dengan pendekatan deskriptif	Menteri Keuangan Nomo 93 Tahun 2015 berjalan cukup lancar, akan tetapi ada beberapa 2. hambatan yang terjadi pada penyaluran dana desa yang mengalami keterlambatan, dimana penyaluran dana desa di Kecamatan Ganra tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan pemerintah.
11.	Rini Listiyani, (2015), Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang	Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 di desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	1. Ketepatan Kebijakan Kebijakan penggunaan anggaran yang ada sudah ditargetkan untuk pembangunan fisik. Begitu juga kebijakan Penggunaan dana desa tahun anggaran 2015. 2. Ketepatan Pelaksana Dalam pelaksanaannya kebijakan depnggunaan dana desa tahun 2015 diselenggarakan pemerintah Bersama masyarakat. 3. Ketepatan Lingkungan Interaksi diantara para Lembaga perumus kebijakan telah berjalan dengan baik..
12.	Suluh Milanti, (2015), Evaluasi	1. Mengetahui bagaimanakah	Kualitatif dengan	1. Pembangunan infrastruktur Desa

	<p>Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2015)</p>	<p>pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2015?</p> <p>2. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2015?</p>	<p>pendekatan deskriptif</p>	<p>Gilangharjo tahun 2015 dilakukan secara terpadu dengan gotong-royong.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015 menggunakan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat.</p>
13.	<p>Ar Royyan dkk, (2018), The Implementation Of Village Fund Policy In Improving Economy Of Village Society (Case Study At Kuala Sub-District Of Nagan Raya District)</p>	<p>Bagaimana kebijakan dana desa ini mampu meningkatkan potensi ekonomi serta pemerataan pendapatan di masyarakat desa?</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>dana desa di Kuala Kecamatan Kecamatan Nagan Raya masih belum dapat meningkatkan potensi desa melalui pemanfaatan dana desa.</p>

14.	Seprida Kurniawati dkk, (2016), The Influence of Village Fund Towards Achievement of Society's Welfare at Wukirsari Village, Yogyakarta	Bagaimana pengelolaan dana desa menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari?	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pengelolaan dana desa dicanangkan pada program pembangunan tahunan, sedangkan implementasinya dikelola oleh tim pengembangan desa yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Semua kegiatan pembangunan sepenuhnya dikendalikan oleh seorang kepala desa
-----	---	---	---	--

Dari penelitian terdahulu diatas diketahui bahwa diberbagai daerah di tanah air, penyaluran dana desa masih belum optimal dan hanya tersalur ke pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan desa dan lain sebagainya. Hal ini merupakan permasalahan klasik penyelewengan dana yang banyak terjadi diberbagai program ekonomi pemerintahan Indonesia. fakta tersebut terkuak di banyak penelitian sebelumnya yang sependapat seperti, penelitian Chasanah dkk (2017), Nasution, dkk (2017), Listiyani, (2015), Milanti, (2015), serta Simangunsong, dkk (2017), berbeda dengan penelitian kali ini yang berjudul “Implementasi Dana Desa pada peningkatan Kewirausahaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Ponorogo” bahwa dana desa efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, hal ini sependapat dengan penelitian Muhammad Eko Atmojo dkk (2017) di Desa Bangunjiwo, bahwa penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo sangat efektif terutama pada pengembangan ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan ekonomi di Desa Bangunjiwo, adapun dari penelitian tersebut membuktikan bahwa salah satu

tujuan adanya program dana desa untuk mengembangkan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di desa dapat diwujudkan secara nyata.

2.2 Kajian Teori

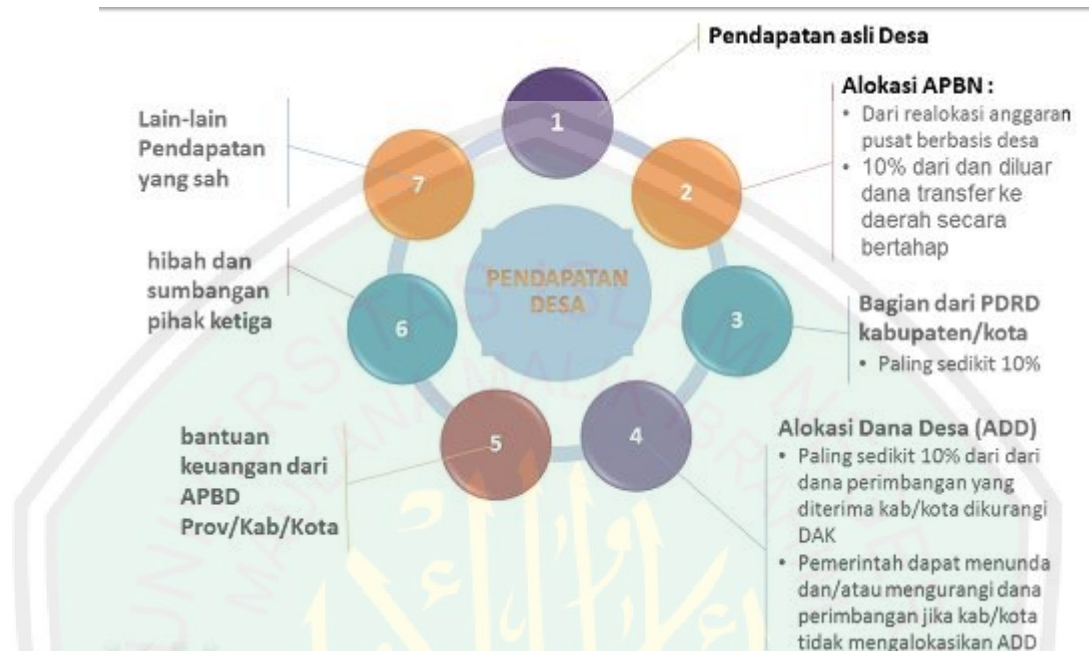
2.2.1 Keuangan Publik

Keuangan berasal dari terjemahan kata *monetary* atau moneter, sedangkan kata *finance* mempunyai arti pembiayaan. Sementara itu, istilah keuangan Negara biasa dikaitkan dengan *public finance*. *Finance* atau pembiayaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat. kekayaan Negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik Negara bukanlah pengeluaran konsumtif melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN. Dengan perkataan lain, meskipun dipisahkan dari APBN, namun dalam waktu tertentu dan secara berangsur-angsur diharapkan dapat 'bergabung' kembali. APBN diadakan berdasarkan atas kuasa undang-undang yang membagi wilayah Negara kesatuan kita menjadi daerah-daerah otonom. Demikian juga kedudukan perusahaan daerah terhadap APBD adalah serupa dengan kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN. (Padmo Wahyono, 1986)

Jimly Assiddiqie (2008) berpendapat keuangan daerah sebenarnya adalah juga keuangan Negara, desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral kedalam pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN.

Gambar 2.1

Pendapatan Asli Desa



Sumber: Kementerian Keuangan 2018

Berdasarkan gambar diatas menggambarkan bahwa pendapatan desa terbagi menjadi tujuh bagian diantaranya:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi APBN
3. Bagian dari PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa (ADD)
5. Bantuan Keuangan dari APBN Provinsi/Kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan yang sah

Dari ketujuh poin diatas, dana desa memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan desa. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, Dana desa paling banyak digunakan untuk pembangunan desa, selanjutnya diikuti oleh pemberdayaan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

2.2.1.1 Program Dana Desa

Program dana desa merupakan program yang berdasar pada peraturan Permendes nomer 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. Filosofi dari dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Penyelenggaraan prioritas penggunaan dana desa adalah dengan program bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa fokus pada dua aspek yakni bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. (Permendes nomor 21, 2015)

Bidang pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan pokok-pokok kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 di arahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi :

- a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

- c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Bidang pemberdayaan masyarakat adalah prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a) peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan;
- b) atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- c) dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh bum desa atau bum desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- d) bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- e) pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader

pemberdayaan masyarakat desa (kpmd) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*community centre*);

- f) promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- g) dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- h) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- i) bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa

2.2.1.2 Definisi Desa

Di Dalam Undang-Undang no. 22 (1999) tentang pemerintah daerah dalam pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sedangkan definisi desa menurut Permendagri nomor 113 (2014) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.2.1.3 Pemerintahan Desa

Menurut PP No. 47 (2015) menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang untuk:
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 4. Menetapkan peraturan desa;
 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Membina kehidupan masyarakat desa;
 7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 11. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 12. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 13. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014).
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :
1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 2. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengiran, keagamaan, dan lain-lain;
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011).

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya kepala desa wajib untuk :

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir

tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

2.2.1.4 Konsep Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Setiawan (2004) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008),

mengatakan bahwa :

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumusan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkan pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

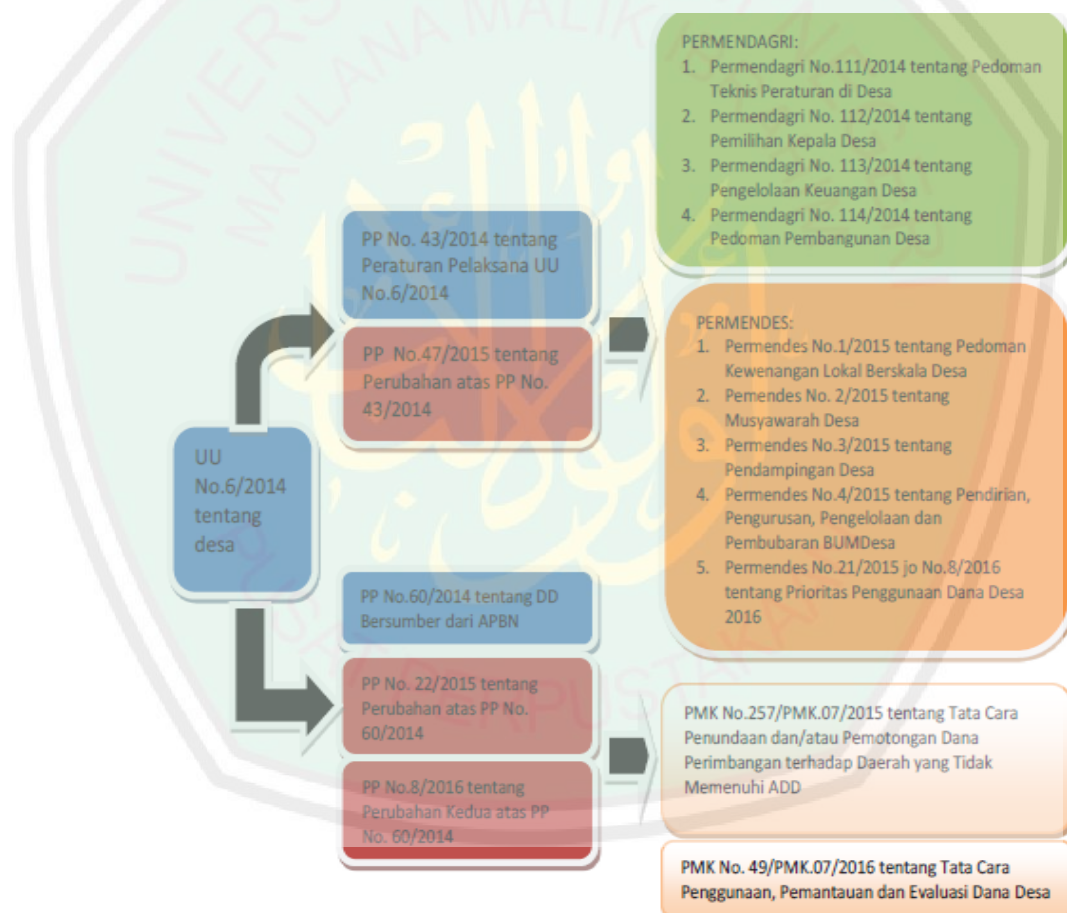
Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya terkadang berisi muatan politik. Dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

2.2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dana desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Gambar 2.2
Dasar Hukum Dana Desa



Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

2.2.1.6 Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 (2014) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 (2014) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.2.1.7 Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 (2014) bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu (Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan;

1. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan.
2. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
3. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian.
4. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
5. Intensitas kegiatan petugas dan pengendalian masalah.
6. Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
7. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit.
8. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan.
9. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat.

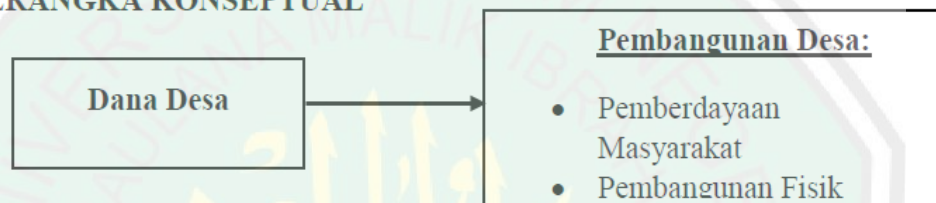
2.2.1.8 Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya (Fuji, 2015). Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, gedung, pelabuhan,

dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Contoh kongkrit dari pembangunan fisik di pedesaan seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan suatu desa ke desa lain yang dilintasi oleh sungai.

Gambar 2.3

KERANGKA KONSEPTUAL



2.2.2 Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Mardi (2000), Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif.

Sebagai upaya untuk menggerakkan keberdayaan ekonomi masyarakat tuna daya, maka banyak yang telah mengaplikasikannya melalui berbagai konsep. Bahkan dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun dari pihak lembaga swadaya melakukan program pemberdayaan dalam berbagai konsep.

Menurut Sumodiningrat (1989) terdapat beberapa konsep pemberdayaan ekonomi yang banyak dipraktikkan dalam pemahaman birokrasi pemerintahan,

secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; d) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

5. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah; a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*, c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pembedayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pembedayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Sumodiningrat (1998) Dalam konsep untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam bentuk beberapa langkah berikut:

1. Memberikan peluang atau akses yang lebih besar pada akses produksi.

Diantara bermacam asset produksi yang paling mendasar adalah akses kepada dana. Sehingga, dengan dana yang memadai dapat pembentukan modal bagi usaha rakyat yang selanjutnya mampu meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan tabungan yang dapat meningkatkan pemupukan modal secara berkesinambungan.

Secara teori, modal usaha yang diperlukan setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan produksi harus berasal dari kemampuan sendiri. Modal tersebut harus dihimpun dari tabungan yang diperoleh dari surplus pendapatan, setelah dikurangi untuk konsumsi jangka pendek. Tabungan dikumpulkan kemudian ditingkatkan menjadi investasi dan digunakan sebagai pembentukan modal. Dengan modal inilah produksi (kegiatan ekonomi) akan semakin meningkat. (Sumodiningrat, 1998). Selanjutnya usaha produksi tersebut akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan pembentukan modal yang bersumber dari kemampuan sendiri.

2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

Upaya yang digunakan dalam memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi adalah dengan pendekatan kebersamaan. Membangun kesetiakawanan dan rasa kesamaan sehingga menciptakan rasa percaya diri dan harga diri dalam menghadapi keterbutuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran, kemauan dan tanggungjawab, bahwa kemenangan dalam pergeluta perdagangan bebas tidak akan tercapai tanpa adanya rasa kebersamaan.

Kemudian Mardi menjelaskan juga usaha untuk mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalau pun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di

bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.

Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis (Mardi, 2000).

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan makin ditingkatkan secara lebih merata, disertai dengan upaya peningkatan gizi. Di samping pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, kesehatan berperan besar dalam menentukan produktivitas.
4. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Proses industrialisasi mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya argo industry dalam proses ini harus dihindari pengusuran ekonomi rakyat dengan perluasan industri berskala besar yang mengambil lahan subur, merusak lingkungan, menguras sumber daya, dan mendatangkan tenaga kerja dari luar.
5. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan dan saling menengah yang kuat dan saling menunjang

6. pembangunan antara daerah, perekonomian rakyat yang tersebar diseluruh penjuru tanah air. Pemerataan dalam hal ini adalah dengan peningkatan kesempatan ekonomi rakyat untuk berkembang lebih cepat.

Dari berbagai butir konsep tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya.

Kemudian pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien. Dan juga pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

Selain itu, praktik pemberdayaan bidang ekonomi saat ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, Menurut Mardi (2000) Terdapat beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Penguatan Modal

Modal dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana aspek permodalan dalam usaha pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dapat memberikan bantuan modal yang tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat, kemudian juga agar modal dapat dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

Cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk

terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

2. Pembangunan prasarana pemasaran

Dalam upaya untuk mendorong produktifitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti yang penting bagi masyarakat kalau produksinya tidak dapat dipasarkan. Melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan maka untuk melahirkan wirausaha sejati tinggal menunggu waktu. Proses selanjutnya perlu dibentuk *networking* bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar.

Upaya pembangunan prasarana penting kiranya untuk dikuatkan, karena dengan adanya prasarana pemasaran dan atau transportasi akan mampu meningkatkan penerimaan baik petani maupun pengusaha mikro. Dalam hal ini pembangunan sarana pemasaran dapat dilakukan sebagai pendukung kegiatan usaha.

3. Pendampingan

Pendampingan sosial merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat.

Menurut Suharto (2007) Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah

memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

Menurut Mardi (2000) berdasarkan Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun (Mardi, 2000)

4. Penguatan kelembagaan

Menurut Mardi (2000) pendekatan kelompok yang dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis.

Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antara skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. ketiga aspek lembaga ini menurut Mardi penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Penguatan kemitraan usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

Menurut Musa Asy'arie (1997) perlu adanya dorongan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memilih peluang menjadi wirausaha, dengan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk mampu bersaing di dunia wirausaha.

Adapun beberapa program pembinaan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan oleh Musa Asy'arie sebagaimana berikut:

1. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala macam permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan dari kelompok swadaya masyarakat adalah

dengan memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta, disamping diharapkan peserta memiliki pengetahuan teoritis. Dengan melalui peatihan seperti ini peserta diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam mengembangkan wirausaha.

2. Pendampingan

Pada tahap ini, yaitu ketika usaha itu dijalankan maka calon wirausaha akan didampingi oleh tenaga pendamping yang professional, yang berfungsi sebagai pengarah maupun sekaligus pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang digelutinya benar-benar mampu dan berhasil dikuasai dan dijalankan.

3. Pemagangan

Pemagangan yang dimaksudkan oleh Musa adalah pemagangan peserta di perusahaan yang berkaitan dengan rencana usaha yang selanjutnya akan dipilihnya. Pemagangan dinilai sangat perlu, karena suasana dan realitas usaha memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan di luar isaha. Tanpa adanya pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empiric maka akan memberikan kesulitan bagi seseorang yang akan memulai usahanya.

4. Permodalan

Permodalan merupakan aspek penting dalam dunia usaha, akan tetapi bukan yang terpenting. Sehingga untuk mendapatkan dukungan

keuangan yang cukup stabil, maka perlu adanya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lain. Penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal tetapi untuk modal pengembangan setelah usaha itu sudah dirintis dan menunjukkan prospek yang cukup baik.

Dari konsep pemberdayaan ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Musa As'arie tersebut di atas, maka Mardi Yatmo Hutomo melakukan beberapa kritik dan juga saran terhadap konsep pemberdayaan yang selama ini berlangsung. Menurut Mardi (2000) perlu adanya konsep yang bisa memberantas ketidakberdayaan warga tuna daya mulai dari akar. Adapun konsep yang beliau tambahkan adalah sebagai berikut.

1. Adanya efektifitas dan efisiensi program pemberdayaan. Maksudnya adalah adanya koordinasi antara lembaga berkaitan dengan gerakan pemberdayaan supaya tidak ada kegiatan atau proyek yang tumpang tindih satu sama lain.
2. Penguasaan faktor produksi
3. Penguatan SDM
4. Spesifikasi lokasi dan permasalahan

2.2.3 Kewirausahaan

2.2.3.1 Pengertian Kewirausahaan

Sampai saat ini konsep kewirausahaan masih terus berkembang. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk

menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai serta berguna bagi diri dan orang lain. Kewirausahaan muncul apabila seseorang berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide baru. Dalam jiwa kewirausahaan tertanam jiwa yang selalu aktif, kreatif, berkarya dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan dalam usahanya. Wirausaha adalah orang yang kreatif menciptakan dan memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya. Seorang wirausaha selalu berusaha meningkatkan kreasi dan inovasi dalam memanfaatkan peluang.

Menurut Kasmir (2006), kewirausahaan adalah suatu kemampuan menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan dan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi dari yang sudah ada sebelumnya. Kemampuan berwirausaha yang kreatif dan inovatif dapat dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses (Suryana, 2006). Peluang sukses di masa depan dapat diraih apabila seorang wirausaha benar-benar memanfaatkan peluang dengan baik dan mempunyai disiplin diri. Sedangkan menurut Zimmerer dalam Suryana (2006)

Kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang dihadapi. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah, sedangkan inovasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan kreativitas untuk memecahkan masalah dan peluang untuk meningkatkan kekayaan hidup. Kekuatan pemikiran wirausaha harus dinyatakan dengan pengetahuan akan berbagai pendekatan bisnis, tidak hanya pikiran yang tajam tetapi seorang wirausaha juga memiliki pengetahuan tentang

keuangan dan masalah sosial. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui instansi terkait maupun sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Kewirausahaan memiliki berbagai nilai yang sangat diperlukan oleh peserta didik dan dapat ditanamkan melalui pendidikan kewirausahaan.

Stoner dalam Jamal Ma'mur Asmani (2011) menyatakan bahwa pada dasarnya kewirausahaan bergerak dari kebutuhan dasar manusia untuk berprestasi. Dapat disimpulkan bahwa jiwa kewirausahaan memiliki andil dalam membentuk manusia untuk berkarya dan berfikir kreatif dalam menciptakan sesuatu yang baru untuk menjadi seorang inovator dan kreatifator. Kewirausahaan dibentuk pada diri seseorang melalui pendidikan atau pelatihan. Pendidikan atau pelatihan kewirausahaan merupakan proses pembelajaran konsep dan *skill* untuk mengenali peluang-peluang yang orang lain tidak mampu melihatnya. Kewirausahaan mengacu pada perilaku yang meliputi: pengambilan inisiatif dan mengorganisasi untuk mengubah sumber daya terhadap resiko dan kegagalan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru memiliki manfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta mampu menghadapi masalah dan memanfaatkan peluang. Esensi kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing.

2.2.3.2 Manfaat dan Tujuan Kewirausahaan

Menurut Rusdiana (2012), manfaat yang dapat diperoleh melalui berwirausaha adalah:

- 1) Memiliki kebebasan untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki. Banyak wirausaha yang berhasil mengelola usahanya karena menjadikan keterampilan/hobinya menjadi pekerjaannya.
- 2) Memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakat. Dengan berwirausaha kita memiliki kesempatan untuk berperan bagi masyarakat dengan menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat.
- 3) Dapat menjadi motivasi tersendiri untuk memulai berwirausaha. Kesuksesan dan ketidaksiuksesan seseorang dalam karier sangat bergantung pada motivasi untuk menjalankan kariernya.

Menurut Basrowi (2011), tujuan kewirausahaan adalah:

- 1) Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas
- 2) Mewujudkan kemampuan dan kemandirian para wirausaha untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
- 4) Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh

2.2.3.3 Sasaran dan Asas Kewirausahaan

Menurut Basrowi (2011), kewirausahaan memiliki asas dan sasaran yang akan dicapai. Sasaran kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Para generasi muda pada umumnya anak-anak sekolah, anak putus sekolah dan calon wirausaha.
- 2) Para pelaku ekonomi yang terdiri atas para pengusaha kecil dan koperasi
- 3) Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan usaha BUMN, organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat.

Asas kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan bisnis yang sehat
- 2) Kemampuan bekerja secara tekun, teliti dan produktif
- 3) Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan serta keberanian mengambil risiko bisnis.

2.2.4 Tunagrahita

Anak tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental (mental retardation), yang bersifat keterbelakangan mental. Secara harfiah tuna artinya merugi, sedangkan grahita artinya pikiran. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental (Aqila, 2011). Menurut Nur'aeni (2004), Anak Tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual atau IQ dan memiliki keterampilan yang penyesuaiannya di bawah rata-rata pada anak seusianya. sedangkan Bambang Putranto mengemukakan, anak Tunagrahita adalah anak yang memiliki kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya dibawah rata - rata normal, sehingga

mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik, menjalin komunikasi serta hubungan sosial.

Tunagrahita ditandai dengan keterbatasan intelegensi dan ketidak cakapan dalam interaksi sosial. Keterbatasan inilah yang membuat para tunagrahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu anak anak tunagrahita membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula

Seseorang dikategorikan berkelainan mental subnormal atau tuna grahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal) Menurut Salmiah (2010), bahwa karaktetistik tingkat IQ dan kemampuan penyandang tuna grahita, dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kemampuan Tuna grahita berdasarkan tingkat IQ

No	Tingkat	Kisaran IQ	Kemampuan
1	Ringan	52-68	Biasanya dapat mencapai kemampuan kerja dan bersosialisasi yang cukup, tetapi ketika mengalami stress social atau ekonomi memerlukan bantuan.
2.	Moderat	36-51	Dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan melakukan pekerjaan yang tidak terlatih atau semi terlatih di bawah pengawasan, juga memerlukan pengawasan dan juga bimbingan ketika mengalami stress social maupun ekonomi yang ringan
3.	Berat	20-35	Dapat memelihara diri sendiri di bawah pengawasan, dapat melakukan beberapa kemampuan perlindungan diri dalam lingkungan yang terkendali
4.	Sangat berat	19 atau kurang	Memiliki koordinasi otot dan berbicara, dapat merawat diri tetapi sangat terbatas, dan memerlukan perawatan khusus.

2.5 Kerangka Berfikir

Tabel 2.3
Kerangka Berfikir

JUDUL
Peningkatan kewirausahaan masyarakat Tuna Grahita melalui dana desa di Desa Karangpatihan Ponorogo
LATAR BELAKANG
Penggunaan dana desa yang masih belum dialokasikan secara maksimal untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
GAP RESEARCH (Celah Penelitian)
Dari beberapa penelitian terdahulu seperti, Julita (2018), Chasanah dkk (2017), Hidayah dkk (2017), Nasution (2017), Simangunsong (2017), Siswanto dkk (2017), Baskara (2016), Sofiyanto (2016), Dzauqy (2015), Listiyani (2015), Milanti (2015) masih terdapat banyaknya dana desa yang masih di salurkan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan dan pembangunan jalan desa, maupun jembatan. Sedangkan didalam penelitian Eko (2017) menunjukkan adanya bentuk penyaluran dana desa untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui kewirausahaan.
FOKUS PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang yang tertulis, fokus penelitian adalah mengetahui Peningkatan kewirausahaan masyarakat Tuna Grahita melalui dana desa
KAJIAN PUSTAKA
Penelitian terdahulu Julita (2018), Chasanah dkk (2017), Eko (2017), Hidayah dkk (2017), Nasution (2017), Simangunsong (2017), Siswanto dkk (2017), Baskara (2016), Sofiyanto (2016), Dzauqy (2015), Listiyani (2015), Milanti (2015)
Kajian teori
1. Keuangan Publik 2. Pendampingan 3. Kewirausahaan 4. Kewirausahaan
METODE PENELITIAN
Penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1) Observasi Partisipan, 2) Wawancara Terstruktur, 3) Dokumentasi serta, 4) Tinjauan Litelatur
ANALISIS DATA
1) Reduksi data, 2) Penyajian data, dan 3) Penarikan kesimpulan
KEABSAHAN DATA
1) Uji <i>credibility</i> (validitas internal), 2) <i>transferability</i> (validitas eksternal), 3) <i>dependability</i> (reliabilitas), serta 4) <i>confirmability</i> (objektivitas)
HASIL PENELITIAN
KESIMPULAN
SARAN

Sumber: diolah peneliti; 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan studi kasus. Denzim dan Lincoln (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Penelitian kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroiti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya (Denzim dan Lincoln, 2009:6).

Penelitian kualitatif secara spesifik diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Yin (2002), studi kasus adalah suatu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*, bila peneliti hanya memiliki peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Nur: 2017).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Desa Karangpatihan merupakan desa yang menerima dana desa. Sebagai desa yang menerima dana desa, sudah sewajarnya peneliti yang juga merupakan warga Ponorogo mengetahui bagaimana Peningkatan kewirausahaan masyarakat Tuna Grahita melalui dana desa. Peneliti akan meninjau bagaimana Peningkatan kewirausahaan masyarakat Tuna Grahita melalui dana desa terkait.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau dapat dikatakan sebagai sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti akan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden (orang yang merespon/ menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti). Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan (data) yang diperoleh menjadi sumber data. Adapun menurut Arikunto (2002: 129) mengatakan bahwa sumber data adalah subyek dimana data diperoleh.

Penentuan subyek pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Kemudian dalam penelitian kualitatif, teknik *sampling* yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. Seperti telah dikemukakan bahwa, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009: 300). Subjek dalam penelitian adalah aparatur desa yang terdiri dari kepala desa,

sekretaris desa, KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, serta masyarakat Desa Karangpatihan, dan berikut daftar informan penelitian:

Tabel 3.1
Deskripsi Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Bapak Eko Mulyadi	Kepala Desa Karangpatihan	Berkepentingan langsung dalam pengelolaan dana desa.
2.	Bapak Marni	Sekretaris Desa Karangpatihan	Berkepentingan langsung dalam pengelolaan keuangan dana desa.
3.	Bapak Samuji	Ketua KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit	Berkepentingan langsung dalam pendampingan warga tunagrahita
4.	Bapak Paimin	Anggota KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit	Berkepentingan langsung dalam pendampingan warga tunagrahita
5.	Bapak Teguh	Anggota KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit	Berkepentingan langsung dalam pendampingan warga tunagrahita
6.	Bapak Setya Budi	Anggota KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit	Berkepentingan langsung dalam pendampingan warga tunagrahita
7.	Bapak Gito	Anggota KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit	Berkepentingan langsung dalam pendampingan warga tunagrahita
8.	Boini, Suratun, Wagi, Parmi, Parmin,	Warga Tunagrahita	Warga pelaku wirausaha

Sumber: Diolah peneliti; 2018

3.4 Data dan Jenis Data

Menurut Moloeng (2009: 158), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan (Nur, 2017: 47). Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan (Bungin, 2001: 128). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pemerintah desa karangpatihan terkait penggunaan dana desa dan juga data dari (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit terkait masyarakat tuna grahita dan data keanggotaan kewirausahaan.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2001: 128). Data diperoleh dari media online dan publikasi penelitian kepustakaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sumber informasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui hasil penelitian. Data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Silalahi (2009: 280) pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

1. Observasi partisipan

Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi (Basuki, 2006: 149). Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi.

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (Basuki, 2006: 171). Peneliti harus mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden (Silalahi, 2009: 313). Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan mengadakan wawancara atas dasar

atau panduan pertanyaan tersebut. Ketika responden merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada setiap orang responden dalam peristiwa yang sama.

Keuntungan wawancara terstruktur adalah mampu memperoleh jawaban yang cukup berkualitas. Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *probing* adalah pewawancara meminta reponden menjelaskan jawabannya secara mendalam. *Prompting* adalah upaya untuk menjamin responden telah memilih sejumlah kemungkinan sebelum menjawab pertanyaan. (Basuki, 2006: 171).

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

4. Tinjauan Literatur

Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data. Pemahaman tentang tinjauan literatur adalah sebagai berikut (Basuki, 2006: 220). Pada tinjauan literatur, seseorang secara sistematis mencoba membaca semua literatur yang relevan dalam sebuah subjek, kadang-kadang mewawancarai pakar dalam subjek tersebut, kemudian mengorganisasi, mensintesis, dan menilai secara kritis sejumlah ragam (*range*) informasi.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, mengelompokkannya, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisanya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah.

Dalam teknik analisis data ini penulis menggunakan teknik analisis Interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menawarkan teknik analisis yang lazim disebut *interactive* model. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yakni (Hadi dan Arif, 2010) :

- 1) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

- 2) Penyajian data (*data display*)

Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3) Penarikan kesimpulan (drawing *conclusion*).

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilaksanakan pembahasan.

3.7 Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moloeng, 2011). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas) (Sugiono, 2014: 270).

1. Uji *credibility* (validitas internal)

Penerapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk:

- a. Pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai.
- b. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti (Moloeng, 2011: 324)

Dalam Sugiyono (2014) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisa kasus negatif, dan *member check*.

2. *Transferability* (validitas eksternal)

Kriteria ini berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas ini menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi tersebut (Moloeng, 2011: 324).

3. *Dependability* (reliabilitas)

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Dengan melakukan cek apakah peneliti sudah berhati-hati dalam penelitian, apakah peneliti membuat kesalahan dalam konseptual penelitian, pengumpulan data, serta proses interpretasinya.

4. *Confirmability* (objektivitas)

Uji objektivitas dilakukan dengan melakukan analisa hasil penelitian yang telah disepakati oleh semua pihak yang terkait. Penelitian dikatakan objektif jika disepakati dan tidak objektif jika tidak disepakati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Desa Karangpatihan Ponorogo

Berikut ini uraian yang menggambarkan kondisi umum Desa Karangpatihan. Data Kondisi umum desa ini bersumber dari Profil Desa Karangpatihan.

4.1.1.1 Demografi

Jumlah penduduk tahun 2017 Desa Karangpatihan seluruhnya berjumlah 5.794 jiwa yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 2.860 jiwa (49,36 %) dan perempuan berjumlah 2.932 jiwa (50,60 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 4.1

Data Penduduk Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2017

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jenis Kelamin	
		Jiwa	KK	Laki-Laki	Perempuan
1	Bendo	1165	304	576	589
2	Bibis	566	234	262	304
3	Krajan	1283	435	635	648
4	Tanggungrejo	2780	897	1447	1333
	Jumlah	5.794	1.870	2.860	2.932
	% thn jml pddk total			49,36%	50,60%

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2017

4.1.1.2 Mata Pencaharian

Penduduk yang tergolong usia produktif di Desa Karangpatihan yaitu sebesar 2.806 atau sebesar 48,42 % dari jumlah penduduk total desa ini. Dimana dari jumlah penduduk sebesar ini terdistribusi ke dalam beberapa jenis mata pencaharian, yaitu buruh tani, petani, pedagang, wiraswasta, dan pegawai. Buruh tani menunjukkan jumlah yang terbesar 2132 jiwa (36,78 %) diikuti oleh petani sebesar 526 jiwa (9,07 %), pedagang sebesar 52 jiwa, wiraswasta sebesar 122 jiwa, pegawai sebesar 38 jiwa sedangkan sebagian kecil lainnya adalah peternak, dan meubel. Disamping itu beberapa penduduk di desa ini juga mempunyai aktivitas tambahan industri rumah tangga yang memproduksi jajanan pasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2

4.1.1.3 Jumlah Penduduk

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

No	Nama Dusun	Mata Pencaharian				
		Buruh tani	Petani	Pedagang	Wiraswasta	Pegawai
1	Bendo	402	48	4	38	5
2	Bibis	200	70	18	12	3
3	Krajan	532	2	6	35	29
4	Tanggungrejo	998	406	24	37	1
	Jumlah	2132	526	52	122	38
	% thd jml pddk total	36,79%	9,07%	0,89%	2,10%	0,65%

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2016

Adapun untuk jumlah penduduk menurut kelompok usia penduduk usia produktif, yaitu penduduk dengan usia 25 – 65 tahun menunjukkan prosentase yang terbesar (48,42 %) dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk kategori manula (> 65 tahun) sebesar 28,82 % dan yang menunjukkan prosentase yang terkecil adalah penduduk usia balita dan usia sekolah sebesar 22,74 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Struktur Umur		
		0 – 25	25 - 65	>65
1	Bendo	269	578	304
2	Bibis	190	498	215
3	Krajan	365	634	380
4	Tanggungrejo	494	1096	771
	Jumlah	1318	2806	1670
	% thd jml pddk total	22,74%	48,42%	28,82%

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2016

Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagian kecil penduduk sudah mencapai pendidikan SMA, bahkan diantaranya mampu menempuh pendidikan hingga tingkat sarjana (S1), masing-masing untuk lulusan SMA sebanyak 345 jiwa (5,95 %) lulusan S1 sebesar 37 orang (0,63 %) dan sebagian sisanya sebesar 140 jiwa (tidak dan belum bersekolah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Pendidikan		
		Tidak Sekolah	SMA	S-1
1	Bendo	36	54	5
2	Bibis	34	63	7
3	Krajan	30	156	20
4	Tanggungrejo	50	72	5
	Jumlah	140	345	37
	% thd jml pddk total	2,41 %	5,95 %	0,63 %

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2016

4.1.1.4 Keadaan Sosial

Budaya masyarakat Desa Karangpatihan adalah gotong royong, pelestarian budaya leluhur seperti hajat bumi dan juga bersih desa. Toleransi antara umat beragama dan budaya bermasyarakat. Hal ini dapat menunjang pengembangan tingkat keswadayaan masyarakat baik dalam bentuk materi, sumbangan pemikiran maupun tenaga sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, untuk tujuan pembangunan desa. Masyarakat yang saling bekerjasama juga akan mendukung dalam pengoptimalan pembangunan desa demi kemajuan bersama.

4.1.1.5 Keadaan Ekonomi

Yang dimaksud sumber daya ekonomi adalah aktivitas penduduk yang menghasilkan sumber penghasilan bagi masyarakat Karangpatihan. Di Desa Karangpatihan Sumber daya ekonomi meliputi sektor industri rumah tangga yang meliputi jajanan pasar, kripik tempe, rangginang, dan tempe, agrobisnis meliputi

sektor pertanian (padi), perkebunan (mangga, jeruk, kacang, melon, jagung, singkong), peternakan, perikanan darat dan kehutanan yang meliputi komoditi kayu jati. Sedangkan sektor peternakan meliputi peternakan kambing, sapi, ayam, bebek dan itik. Untuk sektor perikanan darat meliputi ikan lele.

Tabel 4.5

Data Monografi Sumberdaya Ekonomi
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Tenaga Kerja yang Terserap (orang)				
		Industri RT	AgroBisnis	Perdagangan	Jasa	Wisata
1	Bendo	13	48	4	402	
2	Bibis	7	70	18	200	
3	Krajan	18	2	6	532	
4	Tanggungrejo	26	406	24	998	63
	Jumlah	64	526	52	2132	

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

4.1.1.6 Kondisi Pemerintahan Desa

Berdasarkan letak geografis Desa Karangpatihan berada di wilayah selatan Kabupaten Ponorogo yang secara administratif memiliki luas wilayah $\pm 1.336,6$ hektar, dan ketinggian wilayah sekitar 7 mdpl di daerah rendah dan 153,3 mdpl (meter diatas permukaan laut). Kondisi cuaca dan klimatologi di Desa Karangpatihan memiliki suhu rata-rata harian 31° C. Berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Secara administrasi, Desa Karangpatihan dibatasi oleh :

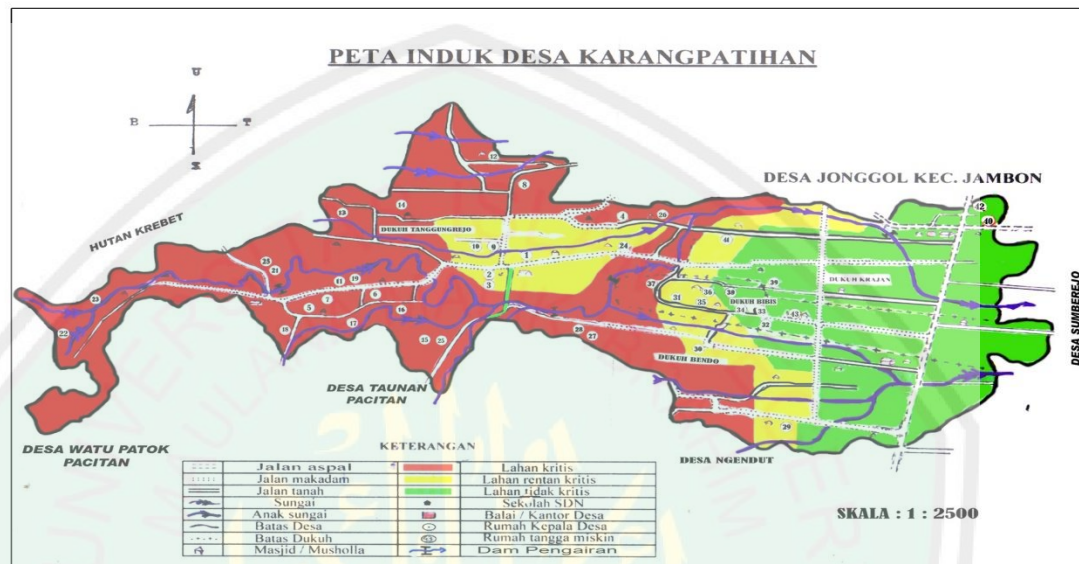
Sebelah Utara : Desa Jonggol Kecamatan Jambon

Sebelah Selatan : Desa Ngendut Kecamatan Balong

Sebelah Barat : Hutan Negara/Kabupaten Pacitan

Sebelah Timur : Desa Sumberejo Kecamatan Balong

Gambar 4.1



Peta Desa Karangpatihan

4.1.1.7 Pembagian Wilayah Desa

Cakupan wilayah Desa Karangpatihan terdiri dari 4 dusun, yang diantaranya :

1. Dusun Bendo terdiri dari 2 RW dan 8 RT
2. Dusun Bibis terdiri dari 2 RW dan 5 RT
3. Dusun Krajan terdiri dari 2 RW dan 9 RT
4. Dusun Tanggungrejo terdiri dari 2 RW dan 12 RT

Desa Karangpatihan memiliki akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekitar 20 Km atau dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan, sementara akses jangkauan ke pusat Kecamatan Balong kurang lebih 5 Km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Sarana layanan transportasi umum yang melalui desa Karangpatihan belum begitu memadai, jangkauan layanan transportasi umum menuju Desa Karangpatihan dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo dapat dijangkau menggunakan transportasi bis menuju kecamatan Balong dengan jarak tempuh sekitar 15 Km atau dengan waktu tempuh 70 menit, dengan kondisi sarana dan prasarana jalan yang telah memadai dan nyaman untuk segala jenis kendaraan. Kemudian menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju Desa Karangpatihan karena layanan transportasi umum tidak mencapai desa ini.

4.1.1.8 Visi dan Misi Desa Karangpatihan

Visi Desa Karangpatihan adalah Dengan Iman dan Taqwa Karangpatihan MANDIRI dalam Pembangunan, Maju, Aman, Nyaman, Damai, Indah, Ramah dan Islami.

Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan dengan Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Menciptakan hubungan Komunikasi yang baik dengan semua unsur lembaga Desa;
3. Menciptakan Jalinan Koordinasi dan Kerjasama yang baik diantara semua unsur lembaga Desa;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian sebagai basis perekonomian masyarakat;
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);
7. Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan;

8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Desa.

4.1.2 Dana Desa di Karangpatihan

Dana desa muncul pada tahun 2015 lalu, dan pada tahun tersebutlah dana desa baru bisa dirasakan manfaatnya oleh Desa Karangpatihan. Jumlah alokasi dana desa juga terus bertambah setiap tahunnya. Peningkatan nominal tersebut menandakan bahwa keberadaan dana desa memang efektif dan bermanfaat dalam mengembangkan desa-desa di tanah air. Terkait manfaat dana desa juga disampaikan oleh kepala Desa Karangpatihan Bapak Eko Mulyadi dalam kesempatan wawancara dengan peneliti, dan berikut kutipan wawancara pada tanggal (24 september, 2018):

“Dana desa sangat bermanfaat ya, dengan adanya dana desa, desa itu bisa melakukan percepatan pembangunan beberapa sektor, sektor ekonomi, infrastruktur, pariwisata, olahraga,”

Pada tahun 2017 Desa Karangpatihan mendapat dana desa sebesar Rp. 875.417.000,00 dana tersebut dipakai untuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur desa, bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan juga bidang-bidang lainnya. dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat dana yang disuntikan sebesar Rp 84.157.000,00 atau setara 10 % dari jumlah total dana desa tahun 2017. Dan berikut draf pendapatan Desa Karangpatihan

Tabel : 4.6

DRAF ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA				
DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG				
TAHUN ANGGARAN 2017				
URAIAN	Vol.	Satuan	Harga (Rp.)	Total Harga (Rp.)
2	3	4	5	6
Pendapatan Transfer				1,735,659,252
Dana Desa				875,417,000
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah				22,683,252
Alokasi Dana Desa				535,839,000

draf pendapatan Desa Karangpatihan 2017

Sumber : Draf anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Karangpatihan. 2017

4.1.3 Permodalan

Modal usaha merupakan hal pokok yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu usaha, terlebih bagi mereka yang hidup berkekurangan dan lemah hal ini memiliki peran penting. Menurut keterangan Bapak Eko sebagai kepala Desa Karangpatihan sekaligus penggagas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita, bahwa modal untuk keberlangsungan kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan bagi warga tunagrahita adalah dari dana-dana sosial, serta program dana desa . Sebagaimana kutipan wawancara beliau adalah sebagai berikut (24 september, 2018):

“Dalam permodalan kami dahulu berawal dari bantuan CSR Bank Indonesia Pada tahun 2011, Untuk kegiatan kewirausahaan ekonomi warga tunagrahita dananya ada juga dari donatur dan juga swadaya. Kemudian pada tahun 2013 ya dari swadaya masyarakat sekitar sini, seperti kerajinan keset untuk alat-alatnya dulu saya belikan dari uang saya sendiri, kemudian untuk gedung rumah harapan itu merupakan wakaf dari bapak Wagiman dan akhirnya kita dirikan rumah harapan, masyarakat pun juga ikut membantu seperti ada yang nyumbang semen, bata, batu, gamping dan lain-lainnya. Semuanya murni hasil dari swadaya masyarakat disini”

Begitu juga penjelasan Bapak Samuji, yang menyatakan bahwa Dalam kegiatan usaha mereka sekarang sudah berjalan dengan baik sehingga modal yang digunakan untuk usaha juga bertambah yakni dari hasil usaha yang dilakukan warga tunagrahita sendiri. Berikut petikan wawancara dengan beliau (24 september, 2018):

“Dulu kita hanya mendapatkan dana CSR, setelah beberapa kegiatan itu berjalan kan tentunya sudah balik modal dan juga dapat keuntungan, nah dari keuntungan itu sebagian kita gunakan untuk memutar modal seperti itu”

hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Marni, selaku Carik Desa Karangpatihan, dengan kutipan wawancara beliau sebagai berikut (24 september, 2018):

“Terkait modal pelaksanaan kegiatan mas, awal mulanya kita dapat dana CSR dari BI dengan dibuatlah budidaya ikan lele, selain itu juga ada beberapa donatur-donatur kemudian dikembangkan dengan berbagai kegiatan diantaranya adalah ternak kambing. Dan ada juga swadaya dari masyarakat sendiri yang ikut mengembangkan kegiatan pemberdayaan di KSM Rumah Harapan tersebut”

Kemudian peneliti melanjutkan dengan pertanyaan berkaitan dengan modal usaha, apakah ada modal dari dana desa untuk kegiatan usaha tersebut? Bapak Marni menjelaskan sebagai berikut (24 september, 2018):

“Pada awalnya permodalan dari dana sosial dan swadaya itu, nah kemudian mulai tahun 2015 ada program dana desa dari pemerintah pusat mas”

Kemudian pertanyaan serupa juga kami tanyakan kepada Bapak Eko, dengan jawaban sebagai berikut (24 september, 2018):

“Ada mas, pasti itu, kan dana desa juga diperuntukan untuk pemberdayaan juga, jadi selain infrastruktur dana desa juga membiayai kegiatan kewirausahaan juga”

Kemudian pernyataan Bapak Marni adalah sebagai berikut (24 september, 2018):

“Dana desa sebenarnya sangat membantu ya, terutama pembangunan desa, tapi karena desa ini luas, ada banyak jalan, banyak sungai, banyak yang harus dibangun, jadi saya kira dana desa masih belum bisa mengcover semua kebutuhan desa”

Dan berikut draf bidang pemberdayaan Desa Karangpatihan :

Tabel : 4.7

DRAF ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG TAHUN ANGGARAN 2017				
URAIAN	Vol.	Satuan	Harga (Rp.)	Total Harga (Rp.)
2	3	4	5	6
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				84,157,000
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa				5,000,000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa				34,537,000
Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat				44,620,000

draf alokasi dana pemberdayaan Desa Karangpatihan 2017

Sumber : Draf anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Karangpatihan. 2017

Dari beberapa penjelasan dan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan modal awal untuk melakukan kegiatan dan pengembangan kegiatan usaha warga tunagrahita di Desa Karangpatihan adalah dari CSR, donatur-donatur, swadaya masyarakat, Dan pada tahun 2015 masuklah dana desa yang memperkuat lagi permodalan kegiatan tersebut

4.1.4 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Warga Tunagrahita

Dalam rangka mendayagunakan dan mengembangkan kemandirian ekonomi khususnya kewirausahaan penyandang tunagrahita, (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit memberikan beberapa pelatihan kegiatan usaha, dalam proses pelatihan mereka mengajarkannya dengan cara praktek yang sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi warga keterbelakangan mental atau tunagrahita

yang diberdayakan. Berikut beberapa tabel dari anggota kegiatan usaha yang berhasil dihimpun di Desa Karangpatihan :

Tabel : 4.8 Data Masyarakat Tunagrahita Pembuat Kerajinan Tasbih

No	Alamat Dukuh	Nama	Jenis Kelamin	Produk Kerajinan
1.	Tanggungrejo	Suratun	Perempuan	Tasbih
2.	Tanggungrejo	Mesidi	Laki-laki	Tasbih
3.	Tanggungrejo	Meswan	Laki-laki	Tasbih
4.	Tanggungrejo	Bagas	Laki-laki	Tasbih
5.	Tanggungrejo	Bodong	Laki-laki	Tasbih
6.	Bendo	Parmin	Laki-laki	Tasbih

Sumber: Data Rumah Harapan diolah peneliti.

Tabel 4.9 Data Masyarakat Tunagrahita Pembuat Kerajinan Batik

No	Alamat Dukuh	Nama	Jenis Kelamin	Produk Kerajinan
1.	Tanggungrejo	Boini	Perempuan	Batik
2.	Tanggungrejo	Wagi	Perempuan	Batik
3.	Tanggungrejo	Partini	Perempuan	Batik
4.	Tanggungrejo	Meslan	Laki-Laki	Batik
5.	Tanggungrejo	Mesidi	Laki-Laki	Batik
6.	Bendo	Parmin	Laki-laki	Batik
7.	Bendo	Mesrah	Perempuan	Batik

Sumber: Data Rumah Harapan diolah peneliti.

Tabel 4.10. Data Masyarakat |Tunagrahita Pembuat Kerajinan Kesen

No	Alamat Dukuh	Nama	Produk Kerajinan
1	Tanggungrejo	1. Boini 2. Misidi 3. Mesiyem 4. Mesirah	Kerajinan keset
		5. Jamun 6. Bodong A 7. Wandu 8. Suratun 9. Katimun 10. Parmi	
2	Krajan	1. Kampret	Kerajinan keset
3	Bibis	-	Kerajinan keset
4	Bendo	1. Sofyan 2. Semok	Kerajinan keset

Sumber: Data Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit diolah peneliti

Berdasarkan kegiatan wawancara dan juga pengamatan peneliti, terdapat beberapa kegiatan pelatihan usaha yang diberikan kepada warga tunagrahita dengan penjabaran yang lebih rinci antara lain sebagai berikut:

4.1.4.1 Pembudidayaan Ternak Ikan Lele

Dalam keterangan peneliti mewawancarai salah satu warga yang melatih beternak lele yaitu Bapak Paimin. Budidaya lele adalah upaya awal untuk mengatasi kondisi alam Desa Karangpatihan yang kering dan tandus saat musim kemarau, yang mana dengan kondisi tersebut tidak dapat memberikan hasil yang baik jika ditanami tumbuh-tumbuhan. Maka, dengan inisiatif dari Pak Eko mereka mencoba untuk melatih beternak lele. Sebagaimana berikut adalah kutipan wawancara dari beliau (24 september, 2018):

“Setiap warga yang miskin dan warga tunagrahita dibuatkan kolam lele kecil dengan ukuran 1x2 m kemudian mereka kami dampingi dari proses

pemberian pakan, proses menguras, dan proses memanen. Selama pemantauan kami mereka mulai memahami dan mengikuti proses yang telah diajarkan meskipun memerlukan banyak waktu”

Kemudian Bapak Paimin menjelaskan lagi bahwa dalam pelatihannya mereka menggunakan praktek yang cukup sederhana. Berikut petikan wawancara beliau (24 september, 2018):

“Awalnya melatih mereka memerlukan kesabaran dan ketelatenan, karena dalam mengajarkannya harus berkompromi secara baik dengan bahasa isyarat dan itupun tidak bisa cepat bahkan bisa sampai berhari- hari baru bisa. Namun dengan ketelatenan alhamdulillah mereka sudah bisa melakukannya walau tidak ada yang mendampingi”

Selanjutnya Bapak Eko juga memberikan keterangan bahwa kegiatan usaha pertama yang drintis dalam rangka pemberdayaan ekonomi warga tunagrahita adalah budidaya ikan lele. Yang mana dari kegiatan berternak lele tersebut setiap panen warga mampu mendapatkan uang sebesar 100-250 ribu per sekali panen. Sebagaimana berikut ini adalah kutipan wawancara beliau (24 september, 2018):

“Jadi kita memberdayakan mereka supaya mandiri yakni dengan membuat kolam kecil dengan maksud untuk budidaya lele. Setiap warga kami bina dengan diberikan pakan, benih. Nah setelah produksi nanti hasilnya kita belikan pakan dan benih lagi baru sisanya kita berikan kepada mereka. Meskipun hasilnya tidak terlalu banyak yakni sekitar 100-250 ribu per sekali panen namun, itu sudah bisa membantu perekonomian keluarga untuk mereka. tunagrahita yang ringan dan yang sedang bisa mengikuti, kalo berat tidak bisa”

Dari kegiatan budidaya ternak lele ini warga miskin tunagrahita dapat menjalankan proses budidaya dengan dibantu oleh pengurus dan masyarakat setempat. Pengurus (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit memberikan pembinaan dalam kegiatan budidaya lele dengan melatih kepada sebagian warga dengan menggunakan bahasa isyarat, mulai dari perawatan kolam, pemberian pakan, dan pemanenan. Warga tunagrahita yang ringan dan sedang bisa mengikuti

pelatihan ini sedangkan yang berat tidak bisa.

4.1.4.2 Pembudidayaan Ternak Hewan Kambing

Selain budidaya ikan lele, warga tunagrahita juga diberikan pelatihan beternak kambing. Menurut Bapak Teguh sebagai penanggungjawab program budidaya hewan kambing menjelaskan bahwa teknik pelatihan yang digunakan dari pengurus yakni dengan cara penyuluhan yakni memberikan 1 ekor kambing kepada setiap masyarakat atau keluarga miskin tunagrahita, kemudian ada 5 ekor kambing yang digilir untuk dipelihara bergantian hingga kambing beranak, baru kemudian bisa berpindah ke warga lainnya. Sebagaimana petikan wawancara dari beliau adalah sebagai berikut (24 september, 2018):

“Begini, kalau berkaitan dengan ternak kambing semua masyarakat miskin bisa mendapatkan. Caranya begini misalkan setiap anggota kelompok terdiri dari 10 orang, itu nanti akan diberikan 15 ekor kambing. Jadi sistemnya setiap orang nanti dapat satu-satu kambing sedangkan yang 5 nanti digilir. Setelah yang 5 kambing tadi beranak, hasil anaknya menjadi milik yang memelihara dan untuk 5 induk kambing giliran tadi digilir kepada warga yang lain. Dan kambing tersebut baru boleh dijual setelah beranak, kami menghimbau untuk pantang dijual sebelum beranak”.

Dari hasil wawancara tersebut, maka konsep budidaya kambing ini adalah berkelompok, setiap warga miskin tunagrahita cukup mencari makan rumput untuk kambing di hutan atau sawah. Kebanyakan warga sudah bisa tanpa diberikan teori atau arahan, dari pengurus hanya memberikan konsep sebagaimana yang disebutkan di atas. Dari hasil ternak kambing ini masyarakat bisa mendapatkan hasil produksi setelah sekitar setahun sekali. Semua akan merasakan hasil dan mendapatkan pendapatan setelah mereka mampu membuat kambingnya beranak kembang.

4.1.4.3 Kerajinan Kesen Perca

Kesen perca merupakan salah satu kerajinan tangan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga, dengan bermodalkan sisa-sisa kain baju yang tidak dipakai oleh penjahit atau yang disebut dengan kain perca bisa dijadikan kerajinan berupa kesen. Menurut keterangan Bapak Samuji, (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit melatih warganya yang miskin tunagrahita dengan membuat kerajinan kesen dan kemudian nanti mereka bisa mandiri memproduksi kesen. Sebagaimana hasil kutipan wawancara beliau sebagai berikut: (24 september, 2018):

“Kalau kesen itu bahannya kadang ada yang nyumbang, kadang ada yang ngasih, Tapi kalau misalkan tidak ada yang nyumbang kita beli di konveksi. Itupun kalau beli saya pilih dahulu. Kalau tidak memilih tidak berani kan bisa rugi kalo misal sekarung harganya 2500/ 1000 per kilo terus yang bisa dipakai cuman sepertiga kan ya rugi”

Kemudian Bapak Samuji menambahkan juga bahwa pembuatan kesen ini bisa dikerjakan di (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit dan bisa juga dikerjakan di rumah mereka masing-masing. Berikut kutipan wawancaranya (24 september, 2018):

“Pas ada kunjungan atau kumpulan maka mereka membuatnya di rumah harapan ini, tapi biasanya mereka lebih bisa maksimal kalau dikerjakan di rumah masing-masing, tapi itupun ya tergantung kalau mereka sudah benar-benar bisa kami memberikan alat untuk bisa dibawa pulang tapi kalo belum lancar tetap disini untuk didampingi”

Dengan dan ekstra kesabaran mereka dikumpulkan dan dilatih oleh pengurus satu persatu, kemudian juga pemberian pemahaman berkaitan proses pemilihan warna, pemasangan alat, perangkaian hingga pengancingan pada proses akhir. Sehingga mulai banyak warga tunagrahita menjadi sangat terampil dalam

membuat keset. Kerajinan keset perca sendiri dijual dengan harga Rp 15.000,00 sampai Rp 20.000,00 per buah.

4.1.4.4 Pembuatan Kerajinan Tangan tasbih

Tak cukup sampai disitu selanjutnya pengurus dari (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit membuat pengembangan konsep usaha lain agar bisa memberikan hasil produksi yang lebih baik dalam hitungan harian ataupun mingguan. Hasilnya mereka membuat pelatihan kerajinan tangan seperti tasbih.

Tasbih merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari manik-manik kecil yang kemudian disusun dan dirancang sesuai jumlah normalnya menggunakan benang senar khusus. Menurut Bapak Samuji, Harga satu tasbih sebesar Rp 5.000, 00. Sedangkan tiap warga yang membuat tasbih akan diberikan upah sebesar Rp 2.000, 00 per unit tasbih. Untuk membuat satu tasbih memerlukan keahlian menghitung jumlah manik-manik hingga berjumlah 33. Awalnya masyarakat bisa mengerjakannya namun banyak yang tidak teliti dalam menghitung, untuk meminimalkan resiko salah jumlah baik kelebihan atau kekurangan manik maka pendamping mensiasatinya dengan memakai alat semacam dakon untuk menghitung jumlah manik secara tepat. Dan berikut hasil wawancara dengan beliau (24 september, 2018):

“Jadi kerajinan tasbih ini untuk merangsang pikiran warga tunagrahita, dengan menghitung jumlah manik-manik untuk membuat tasbih. Ini kan ini pengerjaanya tidak lama. Kalau ditinggal pergi jumlah tasbihnya itu kadang keliru dan tidak sesuai hitungannya.”

Pembuatan kerajinan tasbih masih tetap berjalan meskipun warga pengrajannya sedikit, warga miskin dan tunagrahita tetap dilatih, dipantau dengan sabar oleh para pendamping untuk bisa memproduksi tasbih dengan baik.

Hasilnya pun juga bagus meskipun mereka tunagrahita namun bisa rapi dalam pembuatan kerajinan tersebut.

4.1.4.5 Kerajinan Batik ciprat

Batik ciprat merupakan salah satu produk unggulan Desa Karangpatihan saat ini. Batik ciprat karya warga tunagrahita terbuat dari kain yang kemudian pembuatan batik awal yakni menyiapkan pemanasan cat, kemudian warga dikasih kuas untuk diciprat-ciprat selanjutnya diberi waterglos dan pencucian. Dalam pembuatan batik ini memerlukan beberapa tehnik sehingga prosesnya juga sesuai dengan tehnik yang dijelaskan. Berdasarkan keterangan Bapak Samuji, kerajinan batik ini masih tergolong baru, namun dalam prosesnya warga tunagrahita belum bisa mandiri. Semua alat dan juga bahan-bahan pembuatan batik diberi oleh orang temanggung. Seperti kutipan wawancara beliau berikut (24 september, 2018):

“Untuk kerajinan batik ini warga tunagrahita masih bantu-bantu saja yang golongan ringan karena terhitung masih baru dan belum lama, semua bahan yang dibutuhkan masih didatangkan dari temanggung. Tapi alhamdulillah proses produksi batiknya kemaren sudah terjual banyak dan kita jual dengan kisaran harga 75.000-100.000”

Untuk batik ciprat yang tergolong usaha baru ini masih belum bisa maksimal untuk diajarkan ke seluruh warga tunagrahita namun kategori ringan saja yang dapat dilibatkan, dalam perjalanannya batik ini sudah dipasarkan dengan harga Rp 75.000,00/unit dengan kualitas sedang, dan Rp 100.000,00/unit untuk kualitas lebih bagus.

Hasil dari pelatihan kegiatan usaha ini memang tergantung dari kemampuan tunagrahita dalam menjalankan kegiatan usaha yang telah dilatih oleh pengurus. Dari semua macam kegiatan usaha melalui (KSM) Rumah Harapan

Karangpatihan Bangkit, setiap masyarakat miskin dan tunagrahita diberikan pelatihan secara menyeluruh dan merata. Setelah semua kegiatan pelatihan usaha berjalan, pada akhirnya dapat tersaring pada masing-masing kemampuan yang ditekuni. Jadi tidak semua jenis kegiatan usaha dapat dikuasai oleh setiap warga tunagrahita.

4.1.5 Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan

Munculnya warga tunagrahita tidak terlepas dari sejarah dahulu yakni sekitar tahun 1950 an dimana terjadi paceklik panjang dikawasan pinggiran yang mengakibatkan ladang yang biasanya ditanami bermacam-macam tanaman menjadi rusak dan mati. Dan hal ini langsung berdampak besar terhadap nilai konsumsi gizi masyarakat yang menurun dan akhirnya mereka makan makanan seadanya tanpa memikirkan gizi yang cukup. Sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Pak Samuji (24 september, 2018) sebagai berikut ini:

“Jadi terkait sejarah warga tunagrahita dari ceritanya kakek dan nenek dahulu memang karena gizi buruk pada zaman tahun 50-60 an apalagi desa ini terpencil, mereka miskin, taraf hidup mereka dari mana? orang hamil yang miskin makannya ketela tiwul akhirnya anaknya mereka mengalami cacat mental. Bisa dipastikan mereka seperti itu kekurangan gizi. Dan bukan karena adanya perkawinan sedarah yang banyak isunya menyebar”

Dengan sejarah cerita diatas, menjadikan banyak warga tunagrahita generasi tahun 50 an menghuni di desa ini. Mereka bertahan hidup dengan segala keterbatasan yang ada, warga tunagrahita hanya bisa mengandalkan keberlangsungan hidupnya kepada keluarga mereka dan juga bantuan berupa sumbangan. Mereka menjadi pengangguran dan hanya bisa berjalan-jalan kesana kemari tanpa mendapatkan penghasilan.

Jumlah warga yang menyandang keterbelakangan mental atau Tuna grahita

di Desa Karangpatihan berjumlah 89 orang. Tidak semua warganya disini menyangang keterbelakangan mental atau Tuna grahita, hanya beberapa yang tersebar dalam beberapa dusun. Persebaran warga Tuna grahita tersebut dalam 4 dusun, yakni Dusun Bendo, Dusun Bibis, Dusun Krajan, dan Dusun Tanggungrejo. Warga Tuna grahita terbagi menjadi 3 kategori yakni kategori Tuna grahita ringan, kategori Tuna grahita sedang, dan kategori Tuna grahita berat

Tabel 4.11 Data warga Tuna grahita dalam kegiatan pemberdayaan

No	Nama	Umur	Jenis kelamin		Pendidikan
			L	P	
1	Boini	34		✓	SLB
2	Misidi	36	✓		SLB
3	Wagi	35		✓	SD
4	Parmi	37		✓	SD
5	Siyem	40		✓	SLB
6	Semok	38		✓	-
7	Partini	38		✓	SD
8	Mesirah	35		✓	SD
9	Suratun	40		✓	SD
10	Katimun	42	✓		SD
11	Suji	33	✓		SLB
12	Bodong A	30	✓		SD
13	Wandi	29	✓		SLB
14	Meswan	33	✓		SD
15	Bagas	28	✓		-
16	Bodong B	32	✓		SD
17	Parman	44	✓		SMP
18	Meslan	37	✓		SD
19	Yatemun	41	✓		SMP
Jumlah		-	11	8	-

Sumber: Data Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit diolah peneliti

Dari data tersebut, dapat memberikan penjelasan bahwa warga Tuna grahita dilihat dari sisi umur kebanyakan mereka yang berusia diatas 30 tahun. Kemudian juga dari sisi pendidikan mereka memang banyak yang kurang pendidikan mereka, hal ini dikarenakan memang karena kondisi mereka yang

berketerbelakangan.

4.1.6 Pendampingan

4.1.6.1 Pihak-Pihak Yang Terlibat

1. KSM Rumah harapan karangpatihan bangkit.

Untuk mencapai kemandirian ekonomi bagi kaum tunagrahita, tentunya diperlukan pelatihan serta pendampingan khusus, sehingga diperlukan tenaga pendamping yang profesional dan sabar. Maka Pak Eko Mulyadi selaku kepala desa setempat membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat, yang dinamai dengan (KSM) Rumah harapan karangpatihan bangkit.

Rumah tersebut merupakan suatu wadah yang dalam kegiatannya memfokuskan pada masyarakat miskin tunagrahita di Desa Karangpatihan dalam pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin tunagrahita sehingga mereka dapat memiliki keterampilan berwirausaha, Rumah ini berdiri dan memulai kiprahnya pada tahun 2013, Pembangunan ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat khususnya warga miskin tunagrahita. Sebagaimana pernyataan Pak Eko, sebagai berikut (24 september, 2018):

“Di Karangpatihan ada 85 jiwa tunagrahita. Nah mereka ini nganggur, mereka hidup bergantung pada orang lain dan biasanya orangtua, saudaranya juga miskin, jadi untuk makan, minum intinya bergantung dengan orang lain. Makanya kami berupaya untuk merubah mereka agar bisa mandiri serta tidak lagi bergantung dengan orang lain, dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui

rumah harapan inilah akhirnya kita dapat memperbaiki bersama-sama”

Masyarakat yang menyandang keterbelakangan mental menjadi lebih produktif dan kreatif. Meskipun sulit tetap harus sabar untuk mengajarkannya. Pak Eko, menyatakan sebagai berikut (24 september, 2018):

“Untuk melatih orang-orang dengan keterbelakangan mental sebenarnya sangat sulit, yang penting dibutuhkan banyak kesabaran dan semua itu perlu waktu. Namun pada akhirnya memetik hasil yang membanggakan mas lambat laun mereka bisa berubah”

Dan pada tahun 2013 dibentuklah beberapa personil sebagai struktur kepengurusan yang lebih kuat untuk menangani dan melatih keterampilan wirausaha kepada kaum tunagrahita yang diambil dari beberapa tokoh masyarakat serta warga Desa Karangpatihan dengan struktur kepengurusan berikut:

1. Pelindung : Eko Mulyadi
2. Ketua : Samuji
3. Sekertaris : Teguh Cahyono
4. Bendahara : Sumarsih
5. Bidang Pelatihan :
 - Setiya Budi
 - Imam Hajat
6. Bidang Humas :
 - Yamud
 - Paimin

7. Bidang Pemasaran :

- Gito

2. Tenaga ahli dari Temanggung

Seperti keterangan dari Bapak Samuji, Berkaitan dengan pendampingan, ada juga pendampingan yang mendatangkan langsung pihak dari luar desa seperti pihak dari Temanggung yang memberikan pelatihan batik ciprat. Maka mendatangkan pihak dari luar diperlukan untuk memberikan informasi dan keterampilan yang lebih baik bagi warga tunagrahita. Dan berikut hasil wawancara dengan beliau (24 september, 2018):

“Kalo pendampingan kegiatan budidaya serta kerajinan – kerajinan langsung dari kami oleh pengurus dan masyarakat sekitar saja, nah untuk Batik ciprat, kita mendatangkan orang dari Temanggung untuk memberikan pembinaan terkait keterampilan kerajinan batik yang baik kepada pengurus. Lalu diteruskan pendamping sini mengajarkan kepada warga miskin tunagrahita”

Tujuan dari dibentuknya pendamping bagi setiap jenis usaha yang berbeda adalah untuk memaksimalkan pemahaman serta peningkatan keahlian warga tunagrahita.

4.1.6.2 Proses Pendampingan

Berdasarkan keterangan dari Bapak Samuji, Untuk waktu pendampingan tidak ada jadwal pasti, namun disesuaikan dengan program kewirausahaan dan orangnya, dan berikut kutipan wawancara dengan beliau (24 september, 2018):

“Sebenarnya untuk jadwal pendampingan tidak pasti mas, kadang seminggu ful kadang juga seminggu 3 kali, ya tergantung juga sama yang dilatih, kalau masih belum lancar ya lebih sering juga pelatihannya”

Berikut keterangan mengenai proses pendampingan oleh Bapak Setiya Budi sebagai salah satu pengurus (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit bagian pendampingan (24 september, 2018):

“Biasanya kalau saya sering mendampingi kerajinan tangan, pengarahan mereka kita lakukan dengan cara yang sesederhana mungkin ya untuk bisa dipahami baik oleh mereka, yaitu langsung praktek dengan bahasa isyarat tanpa teori atau lainnya dan harus sabar mas, untuk bahasa isyarat yang dipakai bukan seperti yang ada di tv tv gitu mas jadi versi sini sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah lancar mas seperti keset, tasbih, dan batik”

Kejadian lucu saat mendampingi juga pernah dialami Pak Samuji sebagai pengurus (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit seperti pada kutipan wawancara berikut (24 september, 2018):

“kemarin itu pernah mas terjadi saat pelatihan pembuatan tasbih kalau yang bener kan satu ruas ada 33, karena mereka tidak bisa hitung menghitung, saat saya ngajar yang lain, yang terjadi malah kurang jadi 28, tapi saat ada yang membeli, ya dimaklumi dan tetap dibawa pulang pembeli sebagai oleh oleh gitu mas”

Kemudian peneliti juga menanyakan mengenai upah atau gaji para pendamping tersebut. Dan berikut kutipan wawancara dengan bapak Samuji (24 september, 2018):

“Para pendamping disini itu tidak digaji mas, mereka sukarelawan dan ikhlas lilla lithalla, ”

Pernyataan itu juga diperkuat Bapak Teguh pengurus (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit sebagai berikut ini (24 september, 2018):

“Tidak ada gaji atau imbalan apapun mas, disini murni untuk membantu sesama warga desa yang membutuhkan mas ”

Sedangkan untuk budidaya lele juga sudah terdapat sendiri pendampingnya, yaitu kepala desa Pak Eko mulyadi dan pengurus (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit Pak Paimin. pengajarannya pun dengan cara

yang sederhana agar mudah dipahami warga tunagrahita. Seperti dalam petikan wawancara dengan Pak Paimin, sebagai berikut (24 september, 2018):

“Kita ajari mereka secara menyeluruh mulai dari proses pembibitan, proses pemeliharaan dan juga proses panen yang baik dan benar dengan sedikit bicara tapi yang penting banyak praktik langsungnya, contohnya kalau memberikan pakan kita ajari mereka membuat patokan dari posisi matahari kalo di barat dan di timur waktunya memberi pakan 5 gelas setiap harinya”

Dalam proses pendampingan para relawan harus mengajarkan seluruh tahapan dan proses yang baik kepada warga tunagrahita, tidak jarang pengalaman dari para relawan saat proses mendampingi membuat peneliti heran dan kagum karena fakta dilapangan memang memperlihatkan bagaimana kesulitan dan kesabaran harus dirasakan setiap harinya, salah satu contoh adalah menghadapi sifat warga tunagrahita yang sulit diatur seperti anak kecil yang masih suka bermain sendiri. Namun dibalik semua itu para pendamping tetap sabar dan pantang menyerah sampai warga tunagrahita benar-benar mampu menguasai salah satu bidang atau kerajinan tertentu. pada setiap jenis usaha maupun kerajinan tangan didampingi oleh pengurus (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit sendiri, dan ada juga yang langsung mendatangkan tenaga pendamping ahli dari temanggung untuk mengajarkan cara membatik ciprat, dan yang membanggakan adalah rasa ikhlas dari para pengurus serta semua yang terlibat dalam proses pendampingan yang tidak mengharapkan gaji atau imbalan sedikitpun.

4.1.7 Pemasaran Hasil budidaya dan Produk Kerajinan

Jangkauan pemasaran dari produk-produk warga tunagrahita sebenarnya masih belum luas, namun sudah memiliki riwayat penjualan yang baik, dan berikut adalah berbagai saluran tempat pemasaran produk tunagrahita:

1. Penjualan dari wisata Gunung Beruk Karangpatihan
2. Pembelian langsung oleh para mahasiswa peneliti, KKN, baksos, liputan dan sebagainya di (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit.
3. Pemesanan dari dinas-dinas pemerintahan daerah
4. Penjualan via Media Sosial

Dan berikut uraian yang lebih detail terkait pemasaran produk warga tunagrahita yang berhasil peneliti himpun dari proses wawancara.

Dalam proses pemasaran dan penjualan hasil kerajinan maupun budidaya warga tunagrahita terdapat beberapa cara yang diterapkan oleh (KSM) Rumah Harapan Bangkit, seperti halnya produk pada umumnya, karya warga tunagrahita ini juga memiliki kualitas yang tidak boleh diremehkan dan tidak kalah dari karya kaum normal. dan berikut keterangan dari bapak Samuji terkait strategi penjualannya (24 september, 2018):

“Untuk penjualan kita tidak menargetkan harus laku banyak, yang penting bisa mutar uangnya lagi, biasanya mengirim ke acara expo atau kalau ada pameran. Sering juga dibeli oleh mahasiswa kkn, baksos, pernah juga mengirim ke dinas sejumlah 100 keset”

Mas Teguh juga juga memberikan keterangan mengenai pemasaran hasil kerajinan ini? Sebagai berikut (24 september, 2018):

“Untuk memasarkan kita melibatkan seluruh pihak yang sekiranya mampu menawarkan ke konsumen, seperti kalau pak lurah biasanya menawarkan ke dinas-dinas pemerintahan desa maupun pemerintahan daerah saat kunjungan berlangsung , sedangkan kita juga memasukan ke wisata Gunung Beruk untuk dijual ke wisatawan. Ada juga yang memasarkan lewat Instagram atau facebook, jadi kita gotong royong”

Dalam keterangan Mas Gito, Hasil karya kerajinan tangan warga tunagrahita

juga dijual di wisata Gunung Beruk,. Sebagaimana jawaban dari Mas Gito, berikut (24 september, 2018):

“Kerajinan tangan dan keset juga dijual ke wisata Gunung Beruk, hanya kurang laku saja, karena mayoritas pengunjung nya anak-anak muda”

Dari hasil wawancara tersebut ternyata pangsa pasar yang digunakan untuk memasarkan hasil produksi adalah seperti Dinas-dinas, Media sosial, Selain itu di Desa Karangpatihan ini juga memiliki ikon yang bagus dalam upaya memasarkan hasil kerajinan tangan warga tunagrahita yakni adanya wisata Gunung Beruk. Hanya saja untuk pemasaran di Gunung Beruk masih belum maksimal.

4.1.8 Pendapatan Warga Tunagrahita

4.1.8.1 Dari Kerajinan Tangan

Jenis kerajinan tangan yang sudah berjalan lancar untuk saat ini adalah pembuatan keset perca. Sehingga peneliti akan lebih banyak membahas berkaitan dengan pendapatan kerajinan tangan keset percatersebut. Dari kerajinan tangan tersebut mereka sudah menghasilkan pendapatan yang kemudian bisa digunakan untuk kecukupan hidup sehari-hari.

Menurut keterangan dari Pak Samuji, Setiap kerajinan keset dijual dengan harga Rp 15.000,00 sedangkan untuk mereka warga yang membuat mendapatkan uang per keset sebesar Rp 7.000,00. Dengan kualitas baik dan uang per keset sebesar Rp 7.500,00. Dengan kualitas yang lebih baik. Berikut petikan wawancara dengan beliau (24 september, 2018):

“Ada dua jenis harga itu memang saya sengajakan mas, ya supaya untuk memotifasi yang lain, kalau yang lain bikinannya bagus dan si dia jelek kan ya nanti sadar dan mau berusaha kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih besar seperti yang lain. Dan itupun mereka juga menyadarinya”

Rata-rata mereka dalam sehari bisa menghasilkan 1-2 keset dan mereka bisa mendapatkan penghasilan sehari dari Rp 7.000,- sampai Rp 14.000,- per hari. Sebagaimana ketika diberikan pertanyaan: Dalam sehari bisa menghasilkan produksi keset berapa? Berapa pendapatannya? Boini menjawab sebagai berikut (24 september, 2018):

“Sedino kadang yo oleh siji, kadang yo loro, kadang ora blas pas kuesel. Niku asal arto Rp 75.000,- mari setor winginane”

“sehari kadang ya dapat satu, kadang ya dua, kadang-kadang malah tidak sama sekali saat kondisi capek). Dapat uang Rp 75.000,- setelah setor kemari”

Berikut data wawancara dengan beberapa warga Tuna grahita berkaitan dengan hasil pendapatan dari kerajinan tangan keset:

Tabel 4. 12 Data Hasil Wawancara Pendapatan Kerajinan Tangan Keset

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	Wagi	Berapa pendapatan sehari anda dari hasil kerajinan tangan keset?	Kalau membuat 2 keset dapat uang Rp. 14.000,00
2.	Parmin		Sehari dapat 2 keset sehingga dapat uang Rp. 14.000,00
3.	Boini		Sehari dapat 1 keset sehingga dapat uang Rp. 7.000,00
4.	Suratun		Seminggu dapat 20 keset sehingga mendapat uang Rp. 150.000,00
5.	Parmi		Sehari dapat 1 keset sehingga dapat uang Rp. 7.000,00

Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerajinan lain seperti halnya pembuatan tasbih, batik ciprat, peneliti belum bisa memberikan hasil berapa besar pendapatannya. Karena program pembuatan tasbih banyak yang belum lancar,

selain itu program batik ciprat juga masih dalam tahap pembelajaran sehingga hasil pendapatan setiap warga yang membuat belum jelas.

Dari keterangan diatas, pendapatan yang jelas bisa mereka dapatkan adalah dari pendapatan kerajinan keset karena kerajinan keset ini langsung mendapatkan upah 1 keset dengan harga Rp 7.000,00

4.1.8.2 Pendapatan Dari Budidaya Lele

Selanjutnya untuk pendapatan dari hasil budidaya ikan lele adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Data Hasil Wawancara Pendapatan Budidaya Ikan Lele

No.	Nama	Ukuran kolam	Pendapatan
1.	Sipon	1x2 meter	Setiap panen kita setorkan ke KSM kemudian dapat uang Rp. 170.000,00
2.	Saikem	1x2 meter	Tidak pasti kadang dapat Rp. 180.000,00, pernah juga dapat Rp. 200.000,00
3.	Tukirin	1x2 meter	Panen dijual dan dapat uang Rp. 320.000,00
4.	Wandi	1x2 meter	Setiap panen dapat uang Rp. 210.000,- kadang lebih
5.	Yatemo	1x2 meter	Kalau panen dapat uang RP. 150.000,00-Rp. 250.000,-

Setiap panen warga tidak menentu mendapatkan pendapatan, namun dari data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mereka mendapatkan hasil panen budidaya lele yang berkisar antara 150 ribu hingga 300 ribu per sekali panen.

4.1.9 Klasifikasi Tema

Tabel 4.14

Dana Desa

No	Nama	Pernyataan	Keterangan
1.	Eko Mulyadi (Kepala Desa)	<i>Dana desa sangat bermanfaat ya, dengan adanya dana desa, desa itu bisa melakukan percepatan pembangunan beberapa sektor, sektor ekonomi, infrastruktur, pariwisata, olahraga</i>	Manfaat dana desa

Tabel 4.15

Permodalan

No	Nama	Pernyataan	Keterangan
1.	Eko Mulyadi (Kepala Desa)	<i>Dalam permodalan kami dahulu berawal dari bantuan CSR Bank Indonesia Pada tahun 2011, Untuk kegiatan kewirausahaan ekonomi warga tunagrahita dananya ada juga dari donatur dan juga swadaya. Kemudian pada tahun 2013 ya dari swadaya masyarakat sekitar sini, seperti kerajinan keset untuk alat-alatnya dulu saya belikan dari uang saya sendiri, kemudian untuk gedung rumah harapan itu merupakan wakaf dari bapak Wagiman dan akhirnya kita dirikan rumah harapan, masyarakat pun juga ikut membantu seperti ada yang nyumbang semen, bata, batu, gamping dan lain-lainnya. Semuanya murni hasil dari swadaya masyarakat disini</i>	permodalan
2.	Samuji (pengurus rumah harapan)	<i>Dulu kita hanya mendapatkan dana CSR, setelah beberapa kegiatan itu berjalan kan tentunya sudah balik modal dan juga dapat keuntungan, nah dari keuntungan itu sebagian kita gunakan untuk memutar modal seperti</i>	permodalan

		<i>itu</i>	
3.	Marni (Carik Desa)	<i>Terkait modal pelaksanaan kegiatan mas, awal mulanya kita dapat dana CSR dari BI dengan dibuatlah budidaya ikan lele, selain itu juga ada beberapa donatur-donatur kemudian dikembangkan dengan berbagai kegiatan diantaranya adalah ternak kambing. Dan ada juga swadaya dari masyarakat sendiri yang ikut mengembangkan kegiatan pemberdayaan di KSM Rumah Harapan tersebut</i>	permodalan
4.	Marni (Carik Desa)	<i>Pada awalnya permodalan dari dana sosial dan swadaya itu, nah kemudian mulai tahun 2015 ada program dana desa dari pemerintah pusat mas</i>	permodalan
5.	Eko Mulyadi (Kepala Desa)	<i>Ada mas, pasti itu, kan dana desa juga diperuntukan untuk pemberdayaan juga, jadi selain infrastruktur dana desa juga membiayai kegiatan kewirausahaan juga</i>	pemanfaatan dana desa
6.	Marni (Carik Desa)	<i>Dana desa sebenarnya sangat membantu ya, terutama pembangunan desa, tapi karena desa ini luas, ada banyak jalan, banyak sungai, banyak yang harus dibangun, jadi saya kira dana desa masih belum bisa mengcover semua kebutuhan desa</i>	pemanfaatan dana desa

Tabel 4.16

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Warga Tunagrahita

No	Nama	Pernyataan	Keterangan
1.	Eko Mulyadi (Kepala Desa)	<i>Setiap warga yang miskin dan warga tunagrahita dibuatkan kolam lele kecil dengan ukuran 1x2 m kemudian mereka kami dampingi dari proses pemberian pakan, proses menguras, dan proses memanen. Selama pemantauan kami mereka mulai memahami dan mengikuti proses yang telah diajarkan meskipun memerlukan banyak waktu</i>	budidaya lele

2.	Paimin (pengurus rumah harapan)	<i>Awalnya melatih mereka memerlukan kesabaran dan ketelatenan, karena dalam mengajarkannya harus berkompromi secara baik dengan bahasa isyarat dan itupun tidak bisa cepat bahkan bisa sampai berhari-hari baru bisa. Namun dengan ketelatenan alhamdulillah mereka sudah bisa melakukannya walau tidak ada yang mendampingi</i>	budidaya lele
3.	Eko Mulyadi	<i>Jadi kita memberdayakan mereka supaya mandiri yakni dengan membuat kolam kecil dengan maksud untuk budidaya lele. Setiap warga kami bina dengan diberikan pakan, benih. Nah setelah produksi nanti hasilnya kita belikan pakan dan benih lagi baru sisanya kita berikan kepada mereka. Meskipun hasilnya tidak terlalu banyak yakni sekitar 100-250 ribu per sekali panen namun, itu sudah bisa membantu perekonomian keluarga untuk mereka. tunagrahita yang ringan dan yang sedang bisa mengikuti, kalo berat tidak bisa</i>	budidaya lele
4.	Teguh (pengurus rumah harapan)	<i>Begini, kalau berkaitan dengan ternak kambing semua masyarakat miskin bisa mendapatkan. Caranya begini misalkan setiap anggota kelompok terdiri dari 10 orang, itu nanti akan diberikan 15 ekor kambing. Jadi sistemnya setiap orang nanti dapat satu-satu kambing sedangkan yang 5 nanti digilir. Setelah yang 5 kambing tadi beranak, hasil anaknya menjadi milik yang memelihara dan untuk 5 induk kambing giliran tadi digilir kepada warga yang lain. Dan kambing tersebut baru boleh dijual setelah beranak, kami menghimbau untuk pantang dijual sebelum beranak</i>	ternak kambing
5.	Samuji (pengurus rumah harapan)	<i>Kalau keset itu bahannya kadang ada yang nyumbang, kadang ada yang ngasih, Tapi kalau misalkan tidak ada yang nyumbang kita beli di konveksi. Itupun kalau beli saya pilih dahulu.</i>	kerajinan keset perca

		<i>Kalau tidak memilih tidak berani kan bisa rugi kalo misal sekarung harganya 2500/ 1000 per kilo terus yang bisa dipakai cuman sepertiga kan ya rugi</i>	
6.	Samuji (pengurus rumah harapan)	<i>Pas ada kunjungan atau kumpulan maka mereka membuatnya di rumah harapan ini, tapi biasanya mereka lebih bisa maksimal kalua dikerjakan dirumah masing-masing, tapi itupun ya tergantung kalau mereka sudah benar-benar bisa kami memberikan alat untuk bisa dibawa pulang tapi kalo belum lancar tetap disini untuk didampingi</i>	kerajinan keset perca
7.	Samuji (pengurus rumah harapan)	<i>Jadi kerajinan tasbih ini untuk merangsang pikiran warga tunagrahita, dengan menghitung jumlah manik-manik untuk membuat tasbih. Ini kan ini pengerjaanya tidak lama. Kalau ditinggal pergi jumlah tasbihnya itu kadang keliru dan tidak sesuai hitungannya</i>	kerajinan tasbih
8.	Samuji (pengurus rumah harapan)	<i>Untuk kerajinan batik ini warga tunagrahita masih bantu-bantu saja yang golongan ringan karena terhitung masih baru dan belum lama, semua bahan yang dibutuhkan masih didatangkan dari temanggung. Tapi alhamdulillah proses produksi batiknya kemaren sudah terjual banyak dan kita jual dengan kisaran harga 75.000-100.000</i>	kerajinan batik ciprat

Tabel 4.17

Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan

No	Nama	Pernyataan	Keterangan
1.	Samuji (pengurus rumah harapan)	<i>Jadi terkait sejarah warga tunagrahita dari ceritanya kakek dan nenek dahulu memang karena gizi buruk pada zaman tahun 50-60 an apalagi desa ini terpencil, mereka miskin, taraf hidup mereka dari mana? orang hamil yang miskin makannya ketela tiwul akhirnya anaknya mereka mengalami cacat mental. Bisa dipastikan mereka seperti</i>	sejarah warga tunagrahita

		<i>itu kekurangan gizi. Dan bukan karena adanya perkawinan sedarah yang banyak isunya menyebar</i>	
--	--	--	--

Tabel 4.18

Pemasaran Hasil Budidaya dan Produk Kerajinan

No	Nama	Pernyataan	Keterangan
1.	Samuji (pengurus rumah harapan)	<i>Untuk penjualan kita tidak menargetkan harus laku banyak, yang penting bisa mutar uangnya lagi, biasanya mengirim ke acara expo atau kalau ada pameran. Sering juga dibeli oleh mahasiswa kkn, baksos, pernah juga mengirim ke dinas sejumlah 100 keset</i>	pemasaran produk
2.	Teguh (pengurus rumah harapan)	<i>Untuk memasarkan kita melibatkan seluruh pihak yang sekiranya mampu menawarkan ke konsumen, seperti kalau pak lurah biasanya menawarkan ke dinas-dinas pemerintahan desa maupun pemerintahan daerah saat kunjungan berlangsung, sedangkan kita juga memasukan ke wisata Gunung Beruk untuk dijual ke wisatawan. Ada juga yang memasarkan lewat Instagram atau facebook, jadi kita gotong royong</i>	pemasaran produk
3.	Gito (pengurus rumah harapan)	<i>Kerajinan tangan dan keset juga dijual ke wisata Gunung Beruk, hanya kurang laku saja, karena mayoritas pengunjungnya anak-anak muda</i>	pemasaran produk

Tabel 4.19

Pendapatan Warga Tunagrahita

No	Nama	Pernyataan	Keterangan
1.	Samuji (pengurus rumah harapan)	<i>Ada dua jenis harga itu memang saya sengajakan mas, ya supaya untuk memotifasi yang lain, kalau yang lain bikinannya bagus dan si dia jelek kan ya nanti sadar dan mau berusaha kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih besar seperti yang lain. Dan itupun mereka juga menyadarinya</i>	pendapatan warga tunagrahita
2.	Boini (warga tunagrahita)	<i>sehari kadang ya dapat satu, kadang ya dua, kadang-kadang malah tidak sama sekali saat kondisi capek). Dapat uang</i>	permodalan

		<i>Rp 75.000,- setelah setor kemari</i>	
--	--	---	--

4.2 Pembahasan

4.2.1 Dana Desa di Desa Karangpatihan

Program dana desa merupakan program yang berdasar pada peraturan Permendes nomer 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. Filosofi dari dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. (Permendes nomor 21, 2015)

Di Desa Karangpatihan dana desa masuk pada tahun 2015, berdasarkan hasil penelitian dilapangan dana desa masuk dalam beberapa tahap tiap tahunnya, seperti contoh untuk tahun 2015 sampai 2017 dana desa di Desa Karangpatihan dicairkan melalui 2 tahapan dan dikirim ke rekening desa setempat. Adapun ditahun 2018 ini dana desa cair dalam 3 tahapan. Besaran nominal dana desa terus meningkat setiap tahunnya dan memang sesuai harapan banyak masyarakat desa. Desa Karangpatihan mendapat dana desa sebesar Rp. 875.417.000,00 dana tersebut dipakai untuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur desa, bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat adalah prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Di Desa Karangpatihan Dana desa juga disalurkan di bidang pembinaan masyarakat dan juga bidang-bidang lainnya. dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat dana

yang disuntikan sebesar Rp 84.157.000,00 atau setara 10 % dari jumlah total dana desa tahun 2017 Desa Karangpatihan.

4.2.2 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Warga Tunagrahita

Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk saling memiliki kepedulian. Dalam al-quran juga diterangkan bahwa sebagai umat manusia maka dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

wa ta'aawanuu 'alal birri wattaqwa wa laa ta'aawanuu 'alal itsmi wal 'udwaani waattaquullaha innallaha syadiidul 'iqaab(i)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Maidah: 2)

Dengan adanya sikap saling tolong menolong akan membantu mereka yang lemah, seperti halnya dalam kebelangungan ekonomi masyarakat lemah, khususnya mereka yang memiliki keterbelakangan tidak akan bisa mandiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Namun dengan adanya kondisi keterbatasan tersebut bukan berarti mereka penyandang keterbelakangan mental atau tunagrahita tidak memiliki kemampuan dan dapat bermanfaat seperti manusia normal lainnya.

Agar mereka bisa mandiri dan tidak menggantungkan keberlangsungan hidup sepenuhnya kepada orang lain tentunya membutuhkan sikap kepedulian dari masyarakat lain. Bentuk kepedulian bisa diwujudkan salah satunya dengan pelatihan kewirausahaan.

Selama ini pemenuhan perekonomian penyandang disabilitas kebanyakan dibiarkan menopang pada orang lain ataupun pemerintah. Menurut Dian (2016) selama ini kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah terkhusus penyandang keterbelakangan yang masih menekankan pada peran kementerian sosial, penanganan interdepartemental, dan interinstitusi masih banyak dijumpai masalah. Untuk mencapai tujuan ekonomi masyarakat yang lebih baik maka Desa Karangpatihan membentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dibentuk atas ide masyarakat sekitar yang dinamai dengan (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit.

(KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit berfungsi : Membina, Melatih dan membimbing warga Tuna grahita yang lemah sehingga mereka dapat memiliki keterampilan kewirausahaannya untuk menggerakkan kegiatan ekonomi keluarga mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak bergantung pada bantuan konsumtif. Hal tersebut Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 (2014) bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Adapun warga tunagrahita yang diberdayakan disini adalah dalam kategori tunagrahita ringan dan sedang. Sebagaimana dalam teori Salmiah (2010) berikut:

Tabel 4.20 Kemampuan Tuna grahita berdasarkan tingkat IQ.

No	tingkat	Kisaran IQ	Kemampuan
1	Ringan	52-68	Mampu mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk keberlangsungan hidupnya. Karena menurut keterangan biasanya mereka dapat mencapai kemampuan kerja dan bersosialisasi yang cukup
2.	Moderat	36-51	Mereka dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. karena mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan melakukan pekerjaan yang tidak terlatih atau semi terlatih di bawah pengawasan, juga memerlukan pengawasan dan juga bimbingan ketika mengalami stress sosial maupun ekonomi yang ringan.
3.	Berat	20-35	Kadang bisa dan kadang juga tidak bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan.
4.	Sangat berat	19 atau kurang	Tidak bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan.

Dari data tersebut, warga tunagrahita yang diberdayakan adalah yang ringan sebagaimana penjelasan di atas warga tunagrahita dalam kategori ringan dan sedang masih bisa melakukan aktifitas serta dapat berinteraksi sebagaimana manusia normal lainnya, namun hanya membutuhkan sedikit dukungan yang diperlukan. Sedangkan yang lain dalam kategori berat tidak bisa untuk diberdayakan. Meskipun mereka memiliki keterbatasan khususnya dalam hal kemampuan akal, namun untuk kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup cara mereka mendapatkannya sesuai dengan ajaran islam yakni dengan berusaha sekuat tenaga mencari rezeki tanpa meminta-minta. Tentunya dengan beberapa bantuan yang diberikan oleh masyarakat sekitar melalui pemberdayaan dan pelatihan kewirausahaan. Praktik pemberdayaan bidang ekonomi bagi penyandang tunagrahita memiliki kemiripan dimensi pendekatan Mardi Yatmo

Hutomo sebagai berikut:

1. Penguatan Modal

Tabel 4.21 Modal Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi di (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit

Jenis Modal	Keterangan
Dana CSR	CSR (<i>coorporite Sosial Responsibility</i>) merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dan diberikan kepada pihak yang dapat mengembangkan hasil dana tersebut untuk pengembangan berkelanjutan. Tunagrahita mendapatkan dana CSR dari BI Kediri, dari dana tersebut dibentuklah kegiatan usaha.
Donatur-donatur	Selain CSR, dalam pengembangan kegiatan usaha warga tunagrahita mendapat dana dari donatur-donatur. Donatur tersebut berasal dari donatur dinas-dinas, perusahaan dan lain sebagainya.
Kas hasil penjualan kerajinan tangan	Dari hasil penjualan kerajinan tangan keset, tasbih dan juga batik ciprat 50% akan diberikan kepada pembuat dan 50% dimasukkan kas untuk digunakan putaran modal kegiatan usaha.
Swadaya Masyarakat	Partisipasi warga sekitar juga tercipta, dengan partisipasi berupa kemampuan yang dimiliki warga sekitar baik berupa materi maupun fisik, mereka turut andil dalam menggerakkan pemberdayaan untuk warga tunagrahita. Ada swadaya dengan memberikan sumbangan tanah, wakaf materill, dan juga sumbangan tenaga sebagai bentuk swadaya dari masyarakat sekitar.
Dana desa	Dana desa datang dan memperkuat permodalan kegiatan pemberdayaan dan pelatihan kewirausahaan masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan mulai tahun 2015.

Dari keterangan di atas, dalam penguatan modal pemberdayaan warga tunagrahita menggunakan dana CSR, donatur-donatur tidak tetap, kas hasil penjualan kerajinan tangan, swadaya dari masyarakat sendiri, dan dana desa. Modal- modal yang digunakan dalam pengembangan kegiatan ekonomi

masyarakat tunagrahita melalui pemberdayaan ini banyak menggunakan dana sosial. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan ekonomi yaitu sebagai upaya untuk menggerakkan keberdayaan ekonomi masyarakat tuna daya, maka banyak yang telah mengaplikasikannya melalui berbagai konsep. Bahkan dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun dari pihak lembaga swadaya melakukan program pemberdayaan dalam berbagai konsep (Mardi, 2000)

Modal merupakan salah satu faktor yang menjadikan masalah dalam suatu usaha, apabila ada modal yang cukup kuat maka kegiatan pemberdayaan dan pelatihan kewirausahaan masyarakat dapat berlangsung dengan baik. Sebagaimana aspek penting dalam dunia usaha, akan tetapi bukan yang terpenting. Sehingga perlu mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil.

Jika mengutip dari teori Mardi, permasalahan permodalan dapat diatasi yang mana beliau menyatakan bahwa salah satu aspek permasalahan masyarakat tunadaya adalah permodalan. Sehingga beliau memberikan gagasan untuk cara yang efektif dan efisien dalam penguatan modal usaha adalah dengan memberikan pinjaman mereka di lembaga keuangan hal tersebut dapat melatih tanggungjawab mereka dalam pengembalian kredit (Mardi, 2000).

2. Pelatihan Usaha

Tabel 4.22 Pelatihan Kegiatan Usaha Masyarakat Tunagrahita berdasarkan temuan hasil penelitian

Kategori	Kegiatan	Pelatihan
Pternakan	Budidaya ikan lele	Diberikan kepada warga miskin dan tunagrahita dengan kategori idiot ringan dan sedang. Warga dilatih dan mempraktikkan dengan bahasa isyarat didepan mereka, mulai dari proses pemberian pakan, pengurusan kolam, dan pemanenan. Kemudian juga didampingi.
	Budidaya ternak kambing	Ternak kambing ini dilakukan dengan cara penyuluhan dengan konsep kelompok. Yakni setiap kelompok yang beranggotakan 10 orang akan diberikan 15 ekor. Setiap orang memperoleh 1 kambing, sedangkan untuk yang 5 ekor kambing digilir pada tiap individu kelompok hingga beranak.
	Kerajinan tangan tasbih	Kerajinan tasbih terbuat dari manik-manik yang dirangkai menggunakan benang bening. Warga dilatih merangkai dan menghitung hingga berjumlah 33.
	Kerajinan tangan keset	Kerajinan keset terbuat dari sisa-sisa kain baju atau kain perca, dirangkai hingga menjadi keset. Setelah mereka warga tunagrahita mampu mengerjakan sendiri bisa dikerjakan dirumah masing-masing.
	Kerajinan batik ciprat	Kerajinan batik ciprat dilatih kepada masyarakat tunagrahita mulai persiapan pemanasan cat, batik diciprat-ciprat dengan menggunakan kuas, kemudian pemberian watergloos, pencucian, dan pengeringan.

kegiatan usaha untuk warga miskin dan tunagrahita ini diarahkan pada 2 kategori yakni peternakan dan kerajinan tangan. Ada beberapa usaha yang tidak lancar atau bahkan hampir tidak produksi seperti halnya kerajinan tasbih, hal ini

dikarenakan pangsa pasar yang sedikit sulit. Selain itu untuk kerajinan tangan centong cutil, gantungan kunci masih pada tahap uji coba masih akan dikembangkan oleh mereka.

Tabel di atas menjelaskan bahwa pelatihan kewirausahaan menggunakan praktik secara sederhana, penyuluhan melalui konsep kelompok, dan dengan menggunakan bahasa isyarat. Peneliti melihat bahwa cara-cara pelatihan seperti tersebut memang sesuai untuk warga penyandang keterbelakangan mental, karena masyarakat tunagrahita juga dapat berinteraksi seperti manusia normal lainnya, hanya yang membedakan IQ pada mereka berbeda dengan masyarakat normal.

Sedangkan jika mengacu pada teori bahwa pelatihan usaha yang dapat diberikan kepada peserta yakni berupa pemahaman terhadap konsep-konsep dan segala macam permasalahan yang ada dapat menumbuhkan wawasan lebih menyeluruh dan motivasi terhadap peserta dan dapat memiliki pengetahuan teoritis. Dengan adanya kiat-kiat tertentu maka dapat menghindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam mengembangkan wirausaha (Musa Asy'arie, 1997).

Beberapa kegiatan pendampingan yang diterapkan di Desa Karangpatihan:

Tabel 4.23 Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat Tunagrahita

Jenis pendampingan	Keterangan
Tenaga dari masyarakat setempat	Pendampingan dari pengurus dilakukan pada setiap kegiatan atau pelatihan usaha dengan mengarahkan mereka hingga masyarakat yang dilatih mampu melakukannya sendiri. Pendampingan dengan cara sederhana, langsung praktik kadang dengan bahasa isyarat. Pengurus dari pendampingan tidak mendapatkan gaji, mereka mendampingi dengan sukarela lillahi ta'ala, membantu sebisa mereka. Pendamping selalu siap untuk memberikan info ataupun arahan kepada masyarakat tunagrahita yang diberdayakan
Mendatangkan dari pihak luar	Pendamping dari luar yang dimaksud adalah seperti mendatangkan pihak lain yang lebih profesional untuk memberikan arahan pada program tertentu yang sifatnya sementara. Pendampingan dengan memberikan pelatihan kerajinan tangan seperti oleh orang Temanggung yakni orang dari kementerian sosial. Dari Temanggung pembinaan pelatihan kepada pengurus baru setelah pengurus paham kemudian dari pengurus mengajarkan kepada warga tunagrahita.

Berdasarkan hasil temuan data tersebut diatas menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit

sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita adalah dengan pendampingan dari pengurus sendiri dan masyarakat sekitar, dan juga dengan mendatangkan pendamping dari luar untuk memberikan pelatihan dan pembinaan.

Pendampingan yang dilakukan (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit tidak menggunakan biaya untuk mengaji, karena pendamping tersebut melakukannya dengan sukarela dan tidak mengharapkan biaya atau upah dalam proses pendampingan dan pembinaan kepada warga tunagrahita.

Dalam bantuan pendampingan tersebut sesuai dengan teori Mardi yang menyatakan bahwa dengan adanya pendamping dari luar justru akan menyebabkan biaya transaksi bantuan modal yang mahal jika menggunakan upah, sehingga untuk lebih efisien adalah menggunakan pendamping dari dalam (Mardi, 2000)

Peneliti melihat bahwa pendampingan sebagai proses kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita memang perlu diperkuat karena dengan pendampingan yang lebih kuat maka warga tunagrahita akan lebih mudah untuk melakukan proses kegiatan usaha yang telah dilatih kepada mereka.

3. Pembangunan Prasarana Pemasaran

Ketika hasil usaha produksi sudah dapat di distribusikan, maka (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit melakukan pendistribusian hasil kerajinan tangan dari warga tunagrahita dengan berbagai cara sebagai berikut:

Tabel 4.24 Pemasaran Hasil Kegiatan Usaha

Jenis Pemasaran	Proses
Even expo/ pameran	Apabila ada pameran atau expo yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan, maka hasil kerajinan baik tasbih, keset, batik ciprat dll akan dikirimkan kesana.
Jaringan dinas-dinas	Dengan jaringan yang dimiliki masyarakat setempat seperti dari bapak kepala desa memiliki jaringan pangsa pasarnya ke dinas-dinas, sehingga hasil kerajinan ditawarkan kepada mereka.
Medsos (Media Sosial)	Hasil kerajinan warga tunagrahita juga dijualkan melalui alat media sosial seperti website, instagram, dan lain sebagainya.

Dipasarkan di wisata Gunung Beruk	Desa Karangpatihan memiliki sumber daya alam yang menarik yakni Gunung Beruk, wisata ini dikelola oleh masyarakat dari Karangtaruna. Dengan kerjasama masyarakat Karangtaruna maka sebagian hasil kerajinan dipasarkan pada pengunjung wisata Gunung Beruk.
-----------------------------------	---

Berkaitan dengan pembangunan sarana pemasaran merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai pendukung kegiatan usaha (Mardi, 2000). Hasil usaha berupa kerajinan tangan dari warga tunagrahita dipasarkan oleh pengurus dan juga masyarakat yang mau dengan sukarela. Hasil tersebut dipasarkan dengan berbagai cara ada yang melalui even expo atau pameran, jaringan ke dinas-dinas, media sosial, dan kerjasama dengan Karangtaruna Desa Karangpatihan dalam pemasaran di wisata Gunung Beruk.

Pemasaran hasil kerajinan dilakukan secara bersama-sama oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), untuk hasil dari budidaya ikan lele dan juga kambing langsung dijual ke pasar dan juga pemasok ikan lele dan kambing. Hal tersebut sesuai dengan teori Mardi yang mengatakan bahwa penguatan sarana pemasaran seperti transportasi atau lainnya perlu agar dapat meningkatkan penerimaan pengusaha mikro dan dapat menjadi pendukung kegiatan usaha (Mardi, 2000)

Selain itu, Desa Karangpatihan juga melakukan kegiatan pengelolaan wisata melalui kerjasama Karangtaruna di sini sehingga dapat mengembangkan potensi ekonomi Desa Karangpatihan.

4.2.3 Implikasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita Melalui Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan bagi warga tunagrahita dibentuk dengan memberikan keterampilan sehingga dapat menggerakkan perekonomian mereka. kelancaran kegiatan usaha mereka didampingi oleh (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. Semua kegiatan dilakukan sesuai dengan kekreatifan masyarakat di desa ini.

Adapun perkembangan ekonomi warga tunagrahita setelah adanya pemberdayaan berdampak pada beberapa hal, dampak tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.25

Hasil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita Melalui KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit

Hasil	Keterangan
Memiliki pekerjaan	Pekerjaan pada bidang peternakan, melakukan budidaya ikan lele, kemudian ada ternak hewan kambing. Kemudian Bidang kerajinan tangan, melakukan kegiatan menghasilkan karya kerajinan tangan dari mereka yakni kerajinan tangan tasbih, kerajinan tangan keset.
Pendapatan	<p>Pendapatan konsep harian: Masyarakat dapat mendapatkan pendapatan harian dari kerajinan tangan yang mereka kerjakan. Kerajinan keset dari 1 keset mendapat Rp 7.000,00. Kerajinan tasbih Rp 2.000,00 per biji, kerajinan tangan yang lainnya masih proses uji coba.</p> <p>Pendapatan konsep triwulan: Pendapatan triwulan bisa dihasilkan dari kegiatan ternak ikan lele. Sekali panen dalam 3 bulan sekali warga mendapatkan uang sekitar 150-300 ribuan.</p> <p>Pendapatan konsep tahunan: Hasil dari ternak hewan kambing akan menghasilkan pendapatan tiap tahunnya bagi warga yang mengikuti kegiatan pemberdayaan.</p>

Memenuhi kebutuhan	Kebutuhan yang dapat dipenuhi adalah kebutuhan pokok seperti beras, lauk-pauk, gula, bumbu masak dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder ada sebagian yang bisa dan ada sebagian yang lain tidak bisa namun untuk memenuhinya mereka dengan menggunakan bantuan dari keluarga maupun saudara yang lainnya.
--------------------	--

Dari hasil penelitian pada tabel di atas, sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien. Dan juga pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi (Mardi, 2000)

Ketika seseorang memiliki pekerjaan tentu akan mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana dalam islam juga menyeru umatnya untuk bekerja. Disebutkan dalam firman Allah Q.S. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Huwalladzii ja'ala lakumu l-ardha dzaluulan famsyuu fii manaakibihaa wakuluu min rizqihi wa-ilayhi nnusyuur

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah untuk kita, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kita (kembali Seusai) dibangkitkan” (Al-Mulk: 15)

Dengan adanya pelatihan kewirausahaan, Ekonomi masyarakat tunagrahita tidak bergantung lagi pada bantuan konsumtif, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kemampuan mereka sekarang yang dapat bekerja mandiri dari hasil budidaya maupun kerajinan tangan sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berwirausaha merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi di masyarakat. Melihat fenomena kaum tunagrahita dengan jumlah yang terhitung banyak di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo ini, bisa dikatakan sangat langka terjadi di lingkungan kita, Bukan rahasia umum bila warga tunagrahita banyak yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan dan kekurangannya, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari mereka hanya mengandalkan bantuan konsumtif dari masyarakat.

Pada tahun 2015 muncul program dana desa dari pemerintah yang membawa angin segar bagi Desa Karangpatihan dan seluruh pedesaan di tanah air ini. Dengan adanya dana desa percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi dapat segera tercapai, dana desa bertujuan membangun dan memelihara infrastruktur pedesaan, fungsi dana desa juga bermuara untuk penanggulangan kemiskinan dan juga pemberdayaan ekonomi seperti di Desa Karangpatihan ini. Dana desa disalurkan melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, yang mana bertujuan untuk memberdayakan warga tunagrahita dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan. Dan kini warga tunagrahita tidak lagi menjadi beban di masyarakat karena memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memperbaiki hidupnya.



Pemberdayaan serta pelatihan wirausaha yang dilakukan melalui kelompok swadaya masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit adalah dengan melakukan berbagai kegiatan usaha produktif. Masyarakat tunagrahita diberikan pelatihan, keterampilan, dan pembinaan berwirausaha seperti membudidayakan lele, ternak kambing, dan juga berbagai jenis kerajinan tangan seperti keset, tasbih, gantungan kunci, hingga membatik.

Didalam proses pelatihan usahanya langsung didampingi oleh para pengurus (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit yang berasal dari tenaga masyarakat sekitar desa sendiri, dan juga mendatangkan pendamping dari luar desa. Hasil keterampilan warga tunagrahita dipasarkan di beberapa tempat seperti even expo atau pameran, jaringan dinas-dinas, media sosial, dan juga bekerjasama dengan wisata lokal desa yaitu gunung beruk.

Adanya pemberdayaan dan pelatihan kewirausahaan memberikan hasil pada warga tunagrahita dan juga Desa Karangpatihan diantaranya yaitu:

1. Masyarakat tunagrahita sekarang memiliki sumber pendapatan sendiri.
2. Menumbuhkan rasa gotong royong dan saling membantu sesama pada masyarakat di Desa Karangpatihan.
3. Memperbaiki gizi masyarakat tunagrahita dan memutus mata rantai tunagrahita

Dengan adanya pemberdayaan dan pelatihan wirausaha sekarang masyarakat tunagrahita tidak bergantung lagi pada bantuan dan belas kasihan dari warga sekitar desa, pemberdayaan ekonomi menjadikan perekonomian warga tunagrahita berjalan dan berkembang ke arah yang lebih baik, meskipun dengan

keterbatasan dalam hal kemampuan akal, namun warga tunagrahita mampu melakukan kegiatan perekonomian mereka seperti layaknya masyarakat pada umumnya. Ditambah lagi dengan adanya dana desa menjadikan kegiatan pelatihan kewirausahaan menjadi lebih lancar cepat berkembang karena semakin kuatnya permodalan.

5.2 Saran

Sudah bukan jamannya bila keberadaan kaum tunagrahita dan juga kaum berkebutuhan khusus lainnya dianggap beban, apa lagi dikucilkan di lingkungan masyarakat, mereka semua sama punya hak untuk diayomi serta dilindungi oleh negara. Kita sebagai sesama manusia haruslah saling berbagi dan peduli terhadap nasib mereka, dan di Desa Karangpatihan adalah bukti nyata, kesadaran akan saling peduli dan berbagi terhadap sesama telah menjadi panutan serta inspirasi banyak orang terutama para pemuda generasi penerus bangsa ini.

Mahasiswa yang baik adalah yang mampu menghubungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah terkait, sehingga dapat diwujudkan melalui program-program maupun kebijakan yang pada akhirnya memberikan solusi dari berbagai problematika di dimasyarakat. Dan berikut beberapa saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi pemerintah pusat, agar menambah besaran anggaran program dana desa untuk desa-desa yang darurat atau berkebutuhan khusus, dan terus berupaya memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap rakyat kecil.
2. Bagi pemerintah Desa dan Kabupaten, agar lebih tegas dalam menangani

permasalahan sosial masyarakat tersebut dengan memberikan kemudahan pelayanan yang mendasar seperti kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan agar tidak menyulitkan kepada mereka khususnya masyarakat miskin tunagrahita

3. Bagi desa karangpatihan terutama pengurus (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, agar lebih meningkatkan kinerjanya melalui penciptaan inovasi-inovasi produk kewirausahaan yang berpotensi. Dan juga memperbaiki segmen penjualan dengan menembus pangsa pasar potensial yang ada.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar meneruskan penelitian terkait pengembangan pemberdayaan dan kewirausahaan masyarakat tunagrahita dan memberi ide inovasi kewirausahaan dalam mencapai tujuan kemandirian ekonomi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan J Senjaya. Analisis Gaya Belajar Anak Berkebutuhan Khusus dalam *Journal of Education*. Volume 1. No. 1, Januari 217. hlm. 9.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Ahmad Dzauqy Abdur Rabb, (2015), *Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng*. Jurnal Akuntansi Peradaban 2 (1)
- Anonim (2017). *Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. <http://www.Tabloid-desa.com>.
- Ar Royyan, dkk (2018), *The Implementation of Village Fund Policy in Improving Economy of Village Society (Case Study at Kuala Sub-District of Nagan Raya District)*. Journal of Social Sciences 6 (3)
- Asshiddiqie, Jimly (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
- Basrowi. (2011). *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Basuki, Sulisty. (2006). *Metode Penelitian*. Wedatama Widya Sastra. Jakarta.
- Budi Siswanto, dkk, (2017), *Community Participation and Stakeholders in Village Fund Management*. Journal of Economics and Sustainable Development 8 (20)
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Elma Julita, (2018), *Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016*. Jurnal Ekonomi 4 (1)
- Faizal Amanda Nasution, dkk, (2017), *The Role of Village Funds to the Development Area in the Sub-District of West Bilah, Labuhanbatu Regency, North Sumatera, Indonesia*. Journal of Progressive Science and Technologies 6 (1)

Fajar Baskara, (2016), *Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Dan Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Tahun 2015-2016)*. Journal Of Department of Government Science 5 (1)

Fernandes Simangunsong, dkk, (2017), *Evaluation of Village Fund Managementin Yapen Islands Regency Papua Province(Case Study at PasirPutih Village, South Yapen District)*. Journal of Scientific Research 4 (9)

Gumawan, Sumodiningrat. (1998) *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Hanif, Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.

<https://www.bappenas.go.id/>

<http://www.jpp.co.id>.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907>

<https://www.detik.co.id/>

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://www.youtube.com/watch?v=YYowQkiTG5o>

<https://www.youtube.com/watch?v=vx4FWSyW2X8>

https://www.youtube.com/watch?v=ghd_6cJsUBw

Khuswatun Chasanah, dkk, (2017), *Implementasi Kebijakan Dana Desa*. Journal Of Public Administration 3 (2)

Kusuma, Hendra (2017). *Ekonomi RI tumbuh 5,01 % di kuartal I-2017*.
<http://.m.detik.com>.

Leksono, Sony. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Depok.

Lovelock, Christopher dkk. (2010). *Pemasaran Jasa –Perspektif Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

M Agus Fauzul Hakim (2017). *Eko Mulyadi penggerak perubahan Kampung Idiot*

<https://ekonomi.kompas.com/read/2013/09/16/2108257/Eko.Mulyadi.Penggerak.Perubahan.Kampung.Idiot..>

- Moh. Sofiyanto dkk, (2016), *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen 6 (2)
- Moloeng, Lexy J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moloeng, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad Eko Atmojo dkk, (2017), *Efektivitas Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo*. Jurnal Ekonomi 5 (1)
- Mulyani, Sri (2018), *Buku Pedoman Dana Desa 2018*
- Musa Asy'arie, (1997). *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Lesfi. Yogyakarta.
- Nurman, (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nurul Hidayah, dkk, (2017), *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi 2 (2)
- Peraturan Bupati Ponorogo nomor 85 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, tentang pembangunan desa
- Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
- Rini Listiyani, (2015), *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*. Jurnal Ekonomi Akuntansi 1 (2)
- Saputra, Endang (2017), *Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*.

Seprida Kurniawati, dkk, (2016), *The Influence of Village Fund Towards Achievement of Society's Welfare at Wukirsari Village Yogyakarta*. Journal of Sharia Economy 3 (1)

Sugiyono. (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. (2013), *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Suharto, Edi, (2007). *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri : Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Cetakan 1, PT Refika Aditama. Bandung.

Suharto, Edi. (2005) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung,: PT Refika Aditama,

Suluh Milanti, (2015), *Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2015)*. Journal of Departement Government Science 3 (2)

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2015, tentang Desa

UU No 43 Tahun 2014 tentang desa

Wahyono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, cet. II,

Wibowo, Agus. (2011). *Pendidikan Kewirausahaan (Konsep dan Strategi)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR

DOKUMENTASI



Bersama Kepala Desa Pak Eko Mulyadi



Aktivitas Boini warga tunagrahita pengrajin keset



Potret salah seorang warga tunagrahita bernama Wandu



Wawancara bersama Suratun warga tunagrahita pembuat keset



Salah satu kolam budidaya lele di Desa Karangpatihan



Galeri kegiatan Desa Karangpatihan



Potret bentang alam Desa Karangpatihan



Gamelan untuk kegiatan warga



Teras KSM Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit



Kolam budidaya lele milik salah warga tunagrahita



Bapak Eko Mulyadi melihat Batik Ciprat Karangpatihan



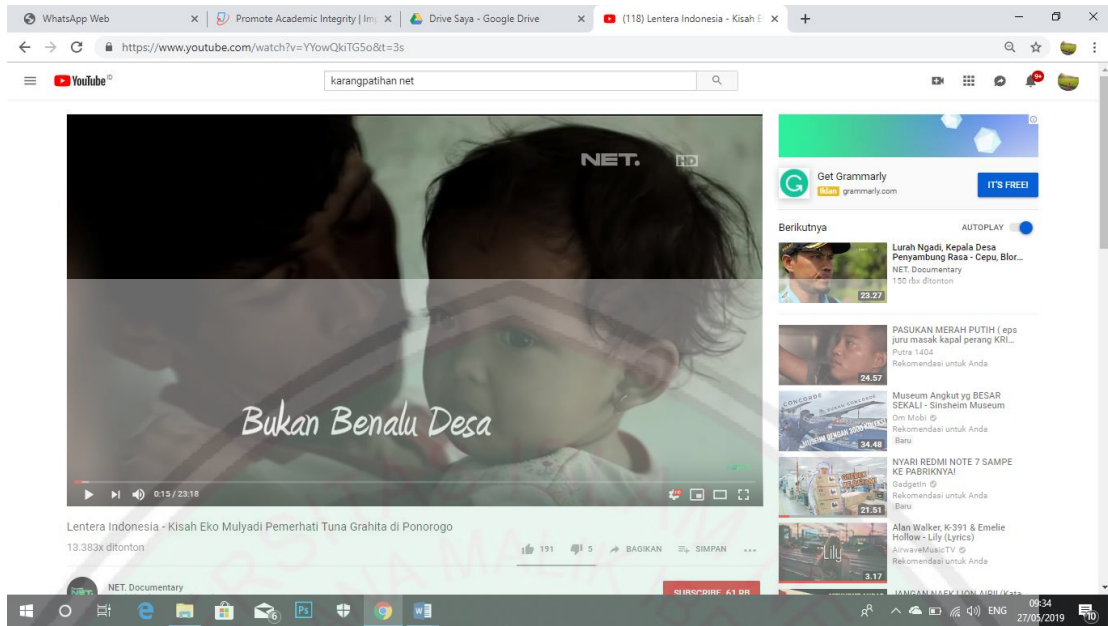
Eko Mulyadi bersama Sipon warga peternak kambing



Bersama Ketua KSM Karangpatihan Bangkit Bapak Samuji



Etalase dan rak tempat untuk memajang hasil kerajinan



<https://www.youtube.com/watch?v=YYowQkiTG5o>

Lentera Indonesia - Kisah Eko Mulyadi Pemerhati Tuna Grahita di Ponorogo



<https://www.youtube.com/watch?v=vx4FWSyW2X8&t=53s>

1. Kampung Idiot Bangkit



2. https://www.youtube.com/watch?v=ghd_6cJsUBw
3. Manfaat Dana Desa 2016, Kestimoni Kades Desa Karangpatihan, Kec Balong, Ponorogo

HASIL WAWANCARA

1. Eko mulyadi kepala desa Karangpatihan

Tanggal 03 Oktober 2018

1. Bagaimana pendapat anda mengenai dana desa?

“Dana desa sangat bermanfaat ya, dengan adanya dana desa, desa itu bisa melakukan percepatan pembangunan beberapa sektor, sektor ekonomi, infrastruktur, pariwisata, olahraga,”

2. Bagaimana proses pencairan dana desa?

“Kalau proses pencairan sesuai dengan mekanisme, artinya junglas – junglisnya sesuai dengan mekanisme”

3. Bagaimana mekanisme penggunaan dana desa?

“Namanya pemerintah desa artinya pemerintahan paling bawah, kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah pusat”

4. Bagaimana penggunaan dana desa untuk insftastruktur?

“Ada macam – macam mas seperti contoh didesa ini ada pembangunan jembatan, jaan talut dan lain sebagainya”

5. Bagaimana penggunaan dana desa untuk pemberdayaan?

“Ada pelatihan masak, pelatihan kewirausahaan yang didalamnya banyak sekali ya..ada batik, keset, pelatihan online, youtuber, fotografi dll anak muda juga kita kasih kesempatan.”

6. Bagaimana respon masyarakat terkait dana desa?

“Sangat senang ya..apa lagi masyarakat tunagrahita ya seneng tok,,”

7. Bagaimana partisipasi masyarakat terkait program dana desa?

“Masyarakat sangat aktif yaa..kayak infrastrktur jufga dari tenaga masyarakat, uang untuk masyarakat, sistem nya padat karya.. kita juga mengadakan pelatihan narasumber juga kita datangkan.”

8. Bagaimana alokasi biaya untuk tiap program ?

“Ya sesuai dengan perencanaan. Dana desa itu diproses mulai dari usulan masyarakat ya, kemudian rembuk desa, rembuk desa menetapkan APBDES anggaran penetapan belanja desa, kemudian diperinci dana desa untuk apa saja sesuai hasil musyawarah”

9. Bagaimana permodalan untuk kegiatan kewirausahaan?

“Dalam permodalan kami dahulu berawal dari bantuan CSR Bank Indonesia Pada tahun 2011, Untuk kegiatan kewirausahaan ekonomi warga tunagrahita dananya ada juga dari donatur dan juga swadaya. Kemudian pada tahun 2013 ya dari swadaya masyarakat sekitar sini, seperti kerajinan keset untuk alat-alatnya

dulu saya belikan dari uang saya sendiri, kemudian untuk gedung rumah harapan itu merupakan wakaf dari bapak Wagiman dan akhirnya kita dirikan rumah harapan, masyarakat pun juga ikut membantu seperti ada yang nyumbang semen, bata, batu, gamping dan lain-lainnya. Semuanya murni hasil dari swadaya masyarakat disini”

10. Apakah terdapat dana desa dalam permodalan kegiatan kewirausahaan?

“Ada mas, pasti itu, kan dana desa juga diperuntukan untuk pemberdayaan juga, jadi selain infrastruktur dana desa juga membiayai kegiatan kewirausahaan juga”

11. Bagaimana proses pendampingan kegiatan usaha warga tunagrahita?

“ada pendampingannya sendiri, ada orangnya sendiri, ada struktur dan bagiannya sendiri, contoh rumah harapan yang kita dirikan secara swasembada, dan kegiatan pelatihannya dibantu dana desa”

12. Bagaimana proses pendampingan kegiatan budidaya lele?

“Setiap warga yang miskin dan warga tunagrahita dibuatkan kolam lele kecil dengan ukuran 1x2 m kemudian mereka kami dampingi dari proses pemberian pakan, proses menguras, dan proses memanen. Selama pemantauan kami mereka mulai memahami dan mengikuti proses yang telah diajarkan meskipun memerlukan banyak waktu. Jadi kita memberdayakan mereka supaya mandiri yakni dengan membuat kolam kecil dengan maksud untuk budidaya lele. Setiap warga kami bina dengan diberikan pakan, benih. Nah setelah produksi nanti hasilnya kita belikan pakan dan benih lagi baru sisanya kita berikan kepada mereka. Meskipun hasilnya tidak terlalu banyak yakni sekitar 100-250 ribu per sekali panen namun, itu sudah bisa membantu perekonomian keluarga untuk mereka. tunagrahita yang ringan dan yang sedang bisa mengikuti, kalo berat tidak bisa”

13. Bagaimana sejarah fungsi rumah harapan karangpatihan bangkit dalam memberdayakan warga tuna grahita?

“Di Karangpatihan ada 85 jiwa tunagrahita. Nah mereka ini nganggur, mereka hidup bergantung pada orang lain dan biasanya orangtua, saudaranya juga miskin, jadi untuk makan, minum intinya bergantung dengan orang lain. Makanya kami berupaya untuk merubah mereka agar bisa mandiri serta tidak lagi bergantung dengan orang lain, dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui rumah harapan inilah akhirnya kita dapat memperbaiki bersama-sama”

14. Bagaimana kendala selama proses pendampingan kegiatan usaha warga tunagrahita?

“Untuk melatih orang-orang dengan keterbelakangan mental sebenarnya sangat sulit, yang penting dibutuhkan banyak kesabaran dan semua itu perlu waktu. Namun pada akhirnya memetik hasil yang membanggakan mas lambat laun mereka bisa berubah”

15. Bagaimana pemasaran hasil produksi dari usaha warga tunagrahita?

“Kesemua ya secara umum, ada orang dating untuk beli, ada juga pesanan dari luar”

16. Bagaimana kondisi ekonomi warga tunagrahita sebelumnya?

“Sebelumnya mereka untuk makan saja sangat susah, belum punya penghasilan”

17. Bagaimana kondisi ekonomi warga tunagrahita setelah ada program tersebut?

“Ada peningkatan mas, meskipun nelum besar seperti kita, ya proses menuju mandiri”

18. Bagaimana harapan kedepannya, terkait dengan dana desa?

“Harapannya dana desa bisa terus berjalan sukur2 ada peningkatan yaa”

2. Pak samuji ketua rumah harapan karangpatihan bangkit

Tanggal 03 oktober 2018

1. Bagaimana awalmula berdirinya rumah harapan?

“Jadi terkait sejarah warga tunagrahita dari ceritanya kakek dan nenek dahulu memang karena gizi buruk pada zaman tahun 50-60 an apalagi desa ini terpencil, mereka miskin, taraf hidup mereka dari mana? orang hamil yang miskin makannya ketela tiwul akhirnya anaknya mereka mengalami cacat mental. Bisa dipastikan mereka seperti itu kekurangan gizi. Dan bukan karena adanya perkawinan sedarah yang banyak isunya menyebar”

2. Bagaimana permodalan untuk kegiatan kewirausahaan?

“Dulu kita hanya mendapatkan dana CSR, setelah beberapa kegiatan itu berjalan kan tentunya sudah balik modal dan juga dapat keuntungan, nah dari keuntungan itu sebagian kita gunakan untuk memutar modal seperti itu”

3. Dari mana bahan pembuatan keset perca didapatkan?

“Kalau keset itu bahannya kadang ada yang nyumbang, kadang ada yang ngasih, Tapi kalau misalkan tidak ada yang nyumbang kita beli di konveksi. Itupun kalau beli saya pilih dahulu. Kalau tidak memilih tidak berani kan bisa rugi kalo misal sekarung harganya 2500/ 1000 per kilo terus yang bisa dipakai cuman sepertiga kan ya rugi”

4. Bagaimana proses pendampingan pembuatan keset perca?

“Pas ada kunjungan atau kumpulan maka mereka membuatnya di rumah harapan ini, tapi biasanya mereka lebih bisa maksimal kalau dikerjakan dirumah masing-masing, tapi itupun ya tergantung kalau mereka sudah benar-benar bisa kami memberikan alat untuk bisa dibawa pulang tapi kalo belum lancar tetap disini untuk didampingi”

5. Bagaimana proses pendampingan pembuatan tasbih?

“Jadi kerajinan tasbih ini untuk merangsang pikiran warga tunagrahita, dengan menghitung jumlah manik-manik untuk membuat tasbih. Ini kan ini pengerjaannya tidak lama. Kalau ditinggal pergi jumlah tasbihnya itu kadang keliru dan tidak sesuai hitungannya. Kemarin itu pernah mas terjadi saat pelatihan pembuatan tasbih kalau yang bener kan satu ruas ada 33, karena mereka tidak bisa hitung menghitung, saat saya ngajar yang lain, yang terjadi malah kurang jadi 28, tapi saat ada yang membeli, ya dimaklumi dan tetap dibawa pulang pembeli sebagai oleh oleh gitu mas”

6. Bagaimana proses pendampingan pembuatan batik ciprat?

“Kalo pendampingan kegiatan budidaya serta kerajinan – kerajinan langsung dari kami oleh pengurus dan masyarakat sekitar saja, nah untuk Batik ciprat, kita mendatangkan orang dari Temanggung untuk memberikan pembinaan terkait keterampilan kerajinan batik yang baik kepada pengurus. Lalu diteruskan pendamping sini mengajarkan kepada warga miskin tunagrahita. Untuk kerajinan batik ini warga tunagrahita masih bantu-bantu saja yang golongan ringan karena terhitung masih baru dan belum lama, semua bahan yang dibutuhkan masih didatangkan dari temanggung. Tapi alhamdulillah proses produksi batiknya kemaren sudah terjual banyak dan kita jual dengan kisaran harga 75.000-100.000”

7. Bagaimana sejarah masyarakat tunagrahita?

“Jadi terkait sejarah warga tunagrahita dari ceritanya kakek dan nenek dahulu memang karena gizi buruk pada zaman tahun 50-60 an apalagi desa ini terpencil, mereka miskin, taraf hidup mereka dari mana? orang hamil yang miskin makannya ketela tiwul akhirnya anaknya mereka mengalami cacat mental. Bisa dipastikan mereka seperti itu kekurangan gizi. Dan bukan karena adanya perkawinan sedarah yang banyak isunya menyebar”

8. Bagaimana jadwal kegiatan pendampingan ?

“Sebenarnya untuk jadwal pendampingan tidak pasti mas, kadang seminggu ful kadang juga seminggu 3 kali, ya tergantung juga sama yang dilatih, kalau masih belum lancar ya lebih sering juga pelatihannya”

9. Bagaimana upah untuk tenaga pendampingnya?

“Para pendamping disini itu tidak digaji mas, mereka sukarelawan dan ikhlas lilla lithalla, ”

10. Bagaimana pemasaran hasil produksi dari usaha warga tunagrahita?

“Untuk penjualan kita tidak menargetkan harus laku banyak, yang penting bisa mutar uangnya lagi, biasanya mengirim ke acara expo atau kalau ada pameran. Sering juga dibeli oleh mahasiswa kkn, baksos, pernah juga mengirim ke dinas sejumlah 100 keset”

11. Bagaimana kondisi ekonomi warga tunagrahita sebelumnya?

“Ya ngga ada pemasukan sama sekali mas, untuk kebutuhan makan saja dari tetangga sekitar”

12. Bagaimana kondisi ekonomi warga tunagrahita setelah ada program tersebut?

“Ya alhamdulillah mas,..jadi walaupun ada sedikit yang tidak ikut juga dengan pelatihan ini,, kadang mereka yang rumahnya jauh”

13. Bagaimana peningkatan prestasi maupun keahlian warga tunagrahita dari kegiatan tersebut?

“Ada dua jenis harga itu memang saya sengajakan mas, ya supaya untuk memotifasi yang lain, kalau yang lain bikinannya bagus dan si dia jelek kan ya nanti sadar dan mau berusaha kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih besar seperti yang lain. Dan itupun mereka juga menyadarinya”

3. Pak marni carik desa

Tanggal 03 oktober 2018

1. Bagaimana permodalan untuk kegiatan kewirausahaan?

“Terkait modal pelaksanaan kegiatan mas, awal mulanya kita dapat dana CSR dari BI dengan dibuatlah budidaya ikan lele, selain itu juga ada beberapa donatur-donatur kemudian dikembangkan dengan berbagai kegiatan diantaranya adalah ternak kambing. Dan ada juga swadaya dari masyarakat sendiri yang ikut mengembangkan kegiatan pemberdayaan di KSM Rumah Harapan tersebut”

2. Tahun berapa awal mula dana desa masuk desa?

“Pada awalnya permodalan dari dana sosial dan swadaya itu, nah kemudian mulai tahun 2015 ada program dana desa dari pemerintah pusat mas”

3. Bagaimana pendapat anda mengenai dana desa?

“Dana desa sebenarnya sangat membantu ya, terutama pembangunan desa, tapi karena desa ini sangat luas, ada banyak jalan, banyak sungai, banyak yang harus dibangun, jadi saya kira dana desa masih belum bisa mengcover semua kebutuhan desa”

4. Bagaimana proses pencairan dana desa?

“Panitia kegiatan beserta TPK bekerja sama untuk membangun satu lokasi, setelah pembangunan selesai baru kita mencairkan uangnya”

5. Bagaimana penggunaan dana desa untuk insfrastruktur?

“Pengaspalan jalan ada 5 titik, jalan macadam ada 2 titik, talut ada 2 titik”

6. Bagaimana pemasaran hasil produksi dari usaha warga tunagrahita?

“Ada pelatihan pemuatan keset, masak, batik ciprat dan banyak lagi”

7. Bagaimana respon masyarakat terkait adanya dana desa?

“Karena sekarang itu ada padat karya tunai yaitu 30% maka masyarakat sangat bisa menggunakan untuk dia bekerja disitu”

8. Bagaimana kondisi ekonomi warga tunagrahita setelah ada program tersebut?

“Kalau untuk tunagrahita sangat terasa ya..dari tadinya sama sekali tidak berdaya, sekarang sudah bisa walaupun kecil bisa menghasilkan, dan masyarakat luas juga merasa terbantu”

9. Bagaimana kendala selama proses pendampingan kegiatan usaha warga tunagrahita?

“Namanya juga tunagrahita mereka sama sekali tidak menerti ya.. disuruh duduk saja kadang pergi ya..”

10. Bagaimana mengatasi kendala selama proses pendampingan kegiatan usaha warga tunagrahita?

“Ya kita yang pertama harus bersabar ya..namanya mengajari orang yang berketerbelakangan ya kita intinya konsisten dan bersabar mas”

11. Bagaimana pemasaran hasil produksi dari usaha warga tunagrahita?

“Justru dipasarkan agak kurang mas,,biasanya ada berapa diambil..lebih rincinya bisa langsung ke pak samuji ya”

12. Bagaimana kondisi ekonomi warga tunagrahita sebelumnya?

“Sebelum ada pelatihan jelas belum ada ekonomi dari warga tunagrahita yang berjalan semestinya”

13. Bagaimana kondisi ekonomi warga tunagrahita setelah ada program tersebut?

“Yang tunagrahita sudah mau duduk dirumah dan tidak lagi berkeluyuran kemana mana karena sudah ada pekerjaan”

14. Bagaimana harapan kedepannya, terkait dengan dana desa?

“Bukan kita memohon atau meminta, akan tetapi apabila dilihat dari besaran wilayah dan jumlah penduduk itu masih kurang mas.”

4. Pak Paimin pengurus penanggung jawab budidaya lele

Tanggal 04 Oktober 2018

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terkait program tersebut?

“Masyarakat sangat antusias mas, apalagi program pemberdayaan ini memang ditujukan untuk orang orang tunagrahita, yang pada dasarnya memang perlu dibina”

2. Bagaimana jadwal kegiatan pendampingan

“Awalnya melatih mereka memerlukan kesabaran dan ketelatenan, karena dalam mengajarkannya harus berkompromi secara baik dengan bahasa isyarat dan itupun tidak bisa cepat bahkan bisa sampai sehari- hari baru bisa. Namun dengan ketelatenan alhamdulillah mereka sudah bisa melakukannya walau tidak ada yang mendampingi”

3. Bagaimana proses pendampingan kegiatan budidaya lele?

“Kita ajari mereka secara menyeluruh mulai dari proses pembibitan, proses pemeliharaan dan juga proses panen yang baik dan benar dengan sedikit bicara tapi yang penting banyak praktik langsungnya, contohnya kalau memberikan pakan kita ajari mereka membuat patokan dari posisi matahari kalo di barat dan di timur waktunya memberi pakan 5 gelas setiap harinya”

4. Bagaimana proses pendampingan kegiatan budidaya lele?

“Untuk jadwal pelatihan budidaya lele ini kita lebih padat mas, mengingat untuk jenis usaha ini perlu ketelatenan lebih, jadi adang seminggu bisa 3-4 kali pelatihan, tapi itu semua menyesuaikan juga dan fleksibel”

5. Bagaimana upah untuk tenaga pendampingnya?

“Disini kita sukarela mas, kan budidaya ini juga masih tahap uji coba dan latihan”

6. Bagaimana pemasaran hasil produksi dari usaha warga tunagrahita?

“Kita pasarkan hasil budidaya langsung ke pasar mas, ada tengkulak yang biasanya ngambil”

5. Pak Teguh pengurus rumah harapan

Tanggal 04 Oktober 2019

1. Bagaimana proses pendampingan kegiatan ternak kambing?

“Begini, kalau berkaitan dengan ternak kambing semua masyarakat miskin bisa mendapatkan. Caranya begini misalkan setiap anggota kelompok terdiri dari 10 orang, itu nanti akan diberikan 15 ekor kambing. Jadi sistemnya setiap orang nanti dapat satu-satu kambing sedangkan yang 5 nanti digilir. Setelah yang 5 kambing tadi beranak, hasil anaknya menjadi milik yang memelihara dan untuk 5 induk kambing giliran tadi digilir kepada warga yang lain. Dan kambing tersebut baru boleh dijual setelah beranak, kami menghimbau untuk pantang dijual sebelum beranak”.

2. Bagaimana upah untuk tenaga pendampingnya?

“Tidak ada gaji atau imbalan apapun mas, disini murni untuk membantu sesama warga desa yang membutuhkan mas”

3. Bagaimana pemasaran hasil produksi dari usaha warga tunagrahita?

“Untuk memasarkan kita melibatkan seluruh pihak yang sekiranya mampu menawarkan ke konsumen, seperti kalau pak lurah biasanya menawarkan ke dinas-dinas pemerintahan desa maupun pemerintahan daerah saat kunjungan berlangsung , sedangkan kita juga memasukan ke wisata Gunung Beruk untuk dijual ke wisatawan. Ada juga yang memasarkan lewat Instagram atau facebook, jadi kita gotong royong”

6. Pak Setyabudi pengurus dan penanggung jawab kerajinan tangan rumah harapan

Tanggal 04 Oktober 2019

1. Bagaimana partisipasi masyarakat tunagrahita terkait program tersebut?

“Masyarakat tunagrahita ya begitu mas keadaannya kalau ndak dibimbing dan dituntun pasti nda focus, tapi secara umum mereka sangat senang dengan pelatihan ini”

2. Bagaimana proses pendampingan kegiatan usaha warga tunagrahita?

“Biasanya kalau saya sering mendampingi kerajinan tangan, pengarahan mereka kita lakukan dengan cara yang sesederhana mungkin ya untuk bisa dipahami baik oleh mereka, yaitu langsung praktek dengan bahasa isyarat tanpa teori atau lainnya dan harus sabar mas, untuk bahasa isyarat yang dipakai bukan seperti yang ada di tv tv gitu mas jadi versi sini sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah lancar mas seperti keset, tasbih, dan batik”

3. Bagaimana kendala selama proses pendampingan kegiatan usaha warga tunagrahita?

“Yang pasti komunikasinya mas, karena mereka ada yang bisu dan tuli apalagi sifat nya yang kadang kekanak-kanakan jadi agak sulit disitu”

7. Mas Gito pengurus rumah harapan

Tanggal 05 oktober 2018

1. Bagaimana pemasaran hasil produksi dari usaha warga tunagrahita?

“Kerajinan tangan dan keset juga dijual ke wisata Gunung Beruk, hanya kurang laku saja, karena mayoritas pengunjung nya anak-anak muda”

8. Warga tunagrahita boini pengrajin keset

Tanggal 05 Oktober 2018

1. Pinten khasile nyambut damel bendinane?

Berapa pendapatan dari bekerja perharinya?

“Sedino kadang yo oleh siji, kadang yo loro, kadang ora blas pas kuesel. Niku asal arto Rp 75.000,- mari setor winginane”

“Sehari kadang ya dapat satu, kadang ya dua, kadang-kadang malah tidak sama sekali saat kondisi capek). Dapat uang Rp 75.000,- setelah setor kemari”

9. Warga tunagrahita suratun pengrajin tasbih

Tanggal 05 Oktober 2018

1. *Pinten khasile nyambut damel bendinane?*

Berapa pendapatan dari bekerja perharinya?

“kula biasanya nggeh entuk kaleh ewu sak tasbih niku”

“biasanya saya mendapat dua ribu untuk tiap tasbih”

10. Warga tunagrahita wagi pengrajin batik

Tanggal 05 Oktober 2018

1. *Pinten khasile nyambut damel bendinane?*

Berapa pendapatan dari bekerja perharinya?

“kolo wingi kula naming pelatihan dados dereng wonten khasile”

“kemarin saya masih penelitian jadi belum ada penghasilan”

11. Warga tunagrahita parmi pengrajin keset

Tanggal 05 Oktober 2018

1. *Pinten khasile nyambut damel bendinane?*

Berapa pendapatan dari bekerja perharinya?

“kula biasane saget nrimo arto nggeh kagem tumbas beras mawon”

“saya biasanya bisa dapat uang untuk membeli beras saja”

12. Warga tunagrahita parmin pengrajin keset

Tanggal 05 Oktober 2018

1. *Pinten khasile nyambut damel bendinane?*

Berapa pendapatan dari bekerja perharinya?

“dereng entuk mas mung taseh pelatihan nggeh an”

“belum dapat mas masih pelatihan saja”

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Agus Nugroho
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 30 September 1995
Alamat Asal : Jl. Sulawesi 40 Mangkujayan Ponorogo
No. Telepon/Hp : 085732690546
E-Mail : agusnugrohonow@gmail.com
Facebook : Agus Nugroho

Pendidikan Formal

2002-2008 : SDN 4 Mangkujayan Ponorogo
2008-2011 : SMPN 2 Ponorogo
2011-2014 : SMAN 3 Ponorogo
2014-2019 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non-Formal

2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015 : Masa Penerimaan Mahasiswa Baru PMII Rayon Ekonomi Moh.
Hatta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2016 : Pelatihan Kader Dasar PMII Rayon Ekonomi Moh. Hatta
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2016 : Anggota HMJ Perbankan Syariah
2016 : Pengurus PMII Rayon Ekonomi Moh. Hatta Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG
DESA KARANGPATIHAN
Jl. Werkudoro No.27 A
KARANGPATIHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/ 741 /405.30.10.05/2018


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : AGUS NUGROHO
NIM : 14540044
Jurusan/Fakultas : S-1 Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Negeri Malang
Keterangan : Orang tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian di
Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo
Judul : **Implementasi Dana Desa Pada Peningkatan Kewirausahaan
Masyarakat Tuna Grahita di Desa Karangpatihan Ponorogo.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Karangpatihan, 24 September 2018

Kepala Desa Karangpatihan


EKO MULYADI



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Agus Nugroho
NIM/Jurusan : 14540044/Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei
Judul Skripsi : Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat Tunagrahita Melalui Dana Desa Di
Desa Karangpatihan Ponorogo

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	01 Mei 2018	Konsultasi Bab I	1.
2	05 Mei 2018	Konsultasi Bab I	2.
3	18 Juni 2018	Konsultasi Bab I, II, dan III	3.
4	24 Juni 2018	Koreksi Bab I, II, dan III	4.
5	20 Juli 2018	Koreksi Proposal dan Fix serta persiapan Ujian Proposal	5.
6	23 Oktober 2018	Konsultasi Daftar Pertanyaan	6.
7	02 Mei 2019	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	7.
8	07 Mei 2019	Konsultasi Bab IV dan V	8.
9	10 Mei 2019	Koreksi serta persiapan Seminar Hasil	9.
10	15 Mei 2019	Konsultasi Skripsi	10.
11	17 Mei 2019	Koreksi Skripsi dan persiapan Ujian Sidang Skripsi	11.

Malang, 28 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah, S.E., M. Si
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Agus Nugroho
NIM : 14540044
Handphone : 085732690646
Konsentrasi : Kewirausahaan
Email : agusnugrohonow@gmail.com

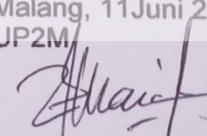
Judul Skripsi : Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat Tuna Grahita Melalui DANA
DESA di Desa Karangpatihan Ponorogo

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	22%	4%	5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11Juni 2019
UP2M


Zuraidah, S.E., M. Si
19761210 200912 2 001

PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT TUNA GRAHITA MELALUI DANA DESA DI DESA KARANGPATIHAN PONOROGO

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.komunitaslogos.com

Internet Source

1%

2

journal.student.uny.ac.id

Internet Source

1%

3

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1%

4

journal.umpo.ac.id

Internet Source

1%

5

halobisnis.com

Internet Source

1%

6

repo.apmd.ac.id

Internet Source

1%

7

mujibatullatifah.blogspot.com

Internet Source

1%

8

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

1%

9	www.coursehero.com Internet Source	1%
10	jamal.ub.ac.id Internet Source	1%
11	ped-kito.blogspot.com Internet Source	1%
12	docslide.us Internet Source	1%
13	hasnah921.blogspot.co.id Internet Source	<1%
14	pulosari-jombang.web.id Internet Source	<1%
15	repository.unika.ac.id Internet Source	<1%
16	www.kemenkeu.go.id Internet Source	<1%
17	share.pdfonline.com Internet Source	<1%
18	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1%
19	AAN ZAINUL ANWAR, RUDI JOKO LAKSONO, DARWANTO DARWANTO. "ANALISA MANAJEMEN PEMBIAYAAN MACET (STUDI PADA BMT MITRA MUAMALAH JEPARA)",	<1%

20	marthainbuton.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
22	mandiri.dpudt-jogja.org Internet Source	<1 %
23	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
24	lalaukan.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	www.pekerjadata.com Internet Source	<1 %
26	desainfarhan.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	simki.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
28	asmi.ac.id Internet Source	<1 %
29	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
30	jom.unri.ac.id Internet Source	<1 %

31

desaciwidey.wordpress.com

Internet Source

<1%

32

larudiwakatobi.blogspot.com

Internet Source

<1%

33

muhammadnasikhul.blogspot.com

Internet Source

<1%

34

jamaninfo.com

Internet Source

<1%

35

Submitted to Doral Academy High School

Student Paper

<1%

36

pendidikansrg.blogspot.com

Internet Source

<1%

37

www.gunadarma.ac.id

Internet Source

<1%

38

blog.binadarma.ac.id

Internet Source

<1%

39

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

<1%

40

ejournal.pin.or.id

Internet Source

<1%

41

jdih.bulungan.go.id

Internet Source

<1%

42	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
43	adhy543.blogspot.com Internet Source	<1%
44	journal.bakrie.ac.id Internet Source	<1%
45	ijpsat.ijsht-journals.org Internet Source	<1%
46	ejournal.politik.lipi.go.id Internet Source	<1%
47	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1%
48	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
49	nafimubarokdawam.blogspot.com Internet Source	<1%
50	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1%
51	www.fisip.unsoed.ac.id Internet Source	<1%
52	Paula Skye Tallman. "Water insecurity and mental health in the Amazon: Economic and ecological drivers of distress", Economic Anthropology, 2019	<1%

53	www.kompasiana.com Internet Source	<1
54	lib.ui.ac.id Internet Source	<1
55	Emha Dzia'ul Haq, Andi Prastowo. "IMPLEMENTATION OF DISCOVERY LEARNING MODEL IN SCIENCES LEARNING AT MIN 1 BANTUL AND SDIT BAIK BANTUL", JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA, 2018 Publication	<1
56	www.gtzsfdm.or.id Internet Source	<1
57	foreks-isei.org Internet Source	<1
58	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1
59	ahmadjailani2.wordpress.com Internet Source	<1
60	ojs.serambimekkah.ac.id Internet Source	<1
61	seputarparung.blogspot.com Internet Source	<1

62	fjridita.wordpress.com Internet Source	<1%
63	dspace.widyatama.ac.id Internet Source	<1%
64	rpdn.or.id Internet Source	<1%
65	portal-ilmu.com Internet Source	<1%
66	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
67	booksreadr.org Internet Source	<1%
68	www.lpmd-balaroapewunu.web.id Internet Source	<1%
69	barae.desa.id Internet Source	<1%
70	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
71	elib.unikom.ac.id Internet Source	<1%
72	yanrafida.files.wordpress.com Internet Source	<1%
73	journal.unsil.ac.id Internet Source	<1%